

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Volume 12 | Nomor 1 | Juni 2020

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Pelindung : Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag

Pengarah : Muhammad sai, MA

Penanggung jawab : Dr. Emawati, M.Ag

Ketua Penyunting : Zaenudin Amrulloh, M.A.

Mitra Bestari :1. Dr. Muchammadun, MM (UIN Mataram)
2. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag (UIN Mataram)
3. Dr. Vina Salviana DS, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)
4. Dr. Nina Mariani Noor, M.Si (UIN Sunan Kalijaga)
5. Dr. Slamet Mulyono, M.Si (UIN Sunan Ampel)

Dewan Penyunting :1. Erwin Padli, M.Hum
2. Siti Aminah, M.Si
3. Iqbal Bafadal, M.Si
4. A.A Istri Ngurah Dyah Prami, M.A
5. Novia Suhastini, M.Si
6. Riska Mutiah, M.Si

Lay-Outer : Safarudin, S.Kom

Sekretariat : Ahmad Khatibul Umam, S.Pd
Sally Niliasari

Alamat

Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337
Email:journalkomunitas@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
KAMPUNG IKLIM DI KELURAHAN TALANGBUBUK, KECAMATAN PLAJU,
KOTA PALEMBANG
Muhammad Reza Hudaya & Titi Puspita D. ~ 1

PENGEMBANGAN PROGRAM TAKHASUS AL-QURAN DI
PONDOKPESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA
Neni Rosita ~ 11

MEMAHAMI PERILAKU MISKIN MASYARAKAT DESA
SENGKERANG, LOMBOK TENGAH: UPAYA DALAM
MENGHADAPI PERSAINGAN
Slti Aminah ~ 29

KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT BAURAN: ANALISIS PADA
INTERAKSI KELOMPOK ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT LOKAL
Riska Mutiah ~ 41

PERAN KOMUNITAS SOSIAL KEAGAMAAN DALAM
MENINGKATKAN RELIGIUSITAS REMAJA: STUDI PADA
IPNU-IPPNU RANTING CAPGAWENSELATAN, KABUPATEN
PEKALONGAN
M. Riziq, A. Mukhlis, dan H. Susanto ~ 50

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh	
ب: b	ف: f	
ت : t	ق: q	
ث : ts	ك : k	
ج : j	ل : l	
ح : h	م : m	
خ : kh	ن : n	
د : d	و : w	
ذ : dz	هـ : h	
ر : r	ء : ' (glide)	
ز : z	ي : y	
س : s	Untuk mad dan diftong	
ش : sy	ا : â	
ص : sh	ي : û	
ض : dh	و : û	
ط : th	أو : au	
ظ : zh	أي : ai	
ع :		

Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang

Muhammad Reza Hudaya^{1*} dan Titis Puspita Dewi²

¹ Alumni Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada; ¹ mrezahdy@gmail.com

² Alumni Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; ² titis.dewi@arjunawijaya.com

* Correspondence

Received: 21/05/2021; Accepted: 21/06/2021; Published: 30/06/2021

Abstrak: Perubahan iklim yang terjadi secara global menjadi isu strategis Indonesia. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melaksanakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini dapat terselenggara melalui partisipasi dari masyarakat minimal setingkat Rukun Warga (RW) atau kampung yang memiliki peran untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. ProKlim ini telah mengimplementasikan proses kerja sama kolaboratif antar aktor pemerintah dan non pemerintah. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara. Data kemudian diolah dari tahap reduksi data, interpretasi temuan, dan diperiksa keabsahannya melalui triangulasi data. Berdasarkan temuan yang dianalisis menggunakan 6 (enam) kriteria *Collaborative Governance* dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Kelurahan Talangbubuk pada implementasi ProKlim dapat dikategorikan sebagai proses kolaborasi.

Abstract: Climate change that occurs globally is a strategic issue for Indonesia. One form of attention from the Government of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry is implementing the Climate Village Program (ProKlim).

This program can be implemented through the participation of the community at least at the level of Rukun Warga (RW) or a village that has a role in reducing the risk of climate change impacts. ProKlim has implemented a collaborative cooperation process between government and non-government actors. In general, the research objective is to describe the implementation of collaborative governance in the implementation of ProKlim in Talangbubuk Village which has received the Main Category ProKlim in 2020. This research uses descriptive qualitative methods through document study and interviews. The data is then processed from the data reduction stage, the interpretation of the findings, and the validity of which is checked through data triangulation. Based on the findings analyzed using 6 (six) Collaborative Governance criteria, it can be concluded that the collaboration between PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Government of Talangbubuk Village, the Palembang City Environment and Sanitation Service, and community of Talangbubuk Village in ProKlim implementation can be categorized as a process collaboration.

Kata Kunci: kolaborasi, non Pemerintah, pemerintah, proklm.

1. Pendahuluan

Pemanasan global merupakan salah satu masalah lingkungan yang masif terjadi saat ini. Hampir seluruh wilayah di dunia mengalami kondisi demikian dengan kenaikan suhu udara yang signifikan. Wilayah perkotaan dengan kondisi lingkungan yang minim tutupan vegetasi menyebabkan kenaikan suhu semakin terasa. Sugiarto, dkk (2018) menyatakan kenaikan suhu minimum dari tahun 1977 hingga 2017 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,5°C, peningkatan suhu udara rata-rata harian sebesar 1,3°C, dan peningkatan suhu udara maksimum sebesar 1,2°C. Perubahan tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat terlebih akibat cuaca yang tidak menentu. Selain itu, karena masyarakat menggantungkan hidupnya pada alam, seperti: petani, buruh tani, dan pekerja perkebunan mengakibatkan secara perlahan memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Dalam skema kebijakan publik, pemerintah sebagai aktor utama yang menangani perubahan iklim telah memiliki kebijakan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan tujuan menangani

perubahan iklim. Adapun kegiatan ProKlim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Pada ProKlim, terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur, seperti penguatan kelembagaan sosial masyarakat dan pengkayaan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, program ini tidak serta merta berjalan saat hanya dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2011 saat pertama kali diluncurkan hingga sekarang, muncul keterlibatan aktor lain, misalnya aktor privat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah lainnya yang turut andil dalam implementasi ProKlim.

Salah satu aktor privat yang turut serta dalam ProKlim adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju mendukung implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam implementasinya, ProKlim di lokasi tersebut dilakukan oleh beberapa *stakeholder* dari sektor publik, aktor privat, dan masyarakat. Proses implementasi kolaborasi antar *stakeholder* menjadi fokus menarik untuk diteliti. Seberapa jauh kerjasama dalam program ini dilakukan, siapa saja aktor yang terlibat dalam ProKlim ini diteliti dengan konsep *collaborative governance* sehingga dapat dikatakan sebagai program yang kolaboratif.

Collaborative governance merupakan salah satu tipe *governance*. Konsep ini menyatakan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerjasama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat (Ansell dan Gash, 2007). Konsep memberikan gambaran bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah selaku aktor publik dan organisasi bisnis selaku aktor privat tidak bekerja secara terpisah melainkan bekerja sama demi kepentingan masyarakat.

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan adanya 6 (enam) kriteria yang penting dalam *collaborative governance*, antara lain:

- a. Forum; dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
- b. Peserta forum termasuk pelaku non negara (lembaga privat).
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik.
- d. Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.

- e. Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama atau konsensus.
- f. Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.

Dalam melakukan proses kolaborasi terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Suatu tahapan model kolaborasi penting untuk dipandang sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Namun, sedikit berbeda dengan pendapat Goliday. Goliday (2010) menyatakan *collaborative governance* melibatkan pengelolaan hubungan untuk memanipulasi regulasi dan sistem, sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil. Menurutny, *collaborative governance* berlaku seperti kemitraan yang dibuat khusus ketika aktor privat menggantikan peran sektor publik. Aspek kolaborasi pada dasarnya membentuk kesamaan tujuan antar aktor pada setiap tahapan kebijakan publik. Sedangkan kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari hingga April 2021 di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kelurahan Talangbubuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki perbedaan dengan lokasi lain terkait pelaksanaan ProKlim, khususnya yang dilaksanakan di Kota Palembang. Pada implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk telah mengkolaborasikan antar aktor dengan skema *collaborative governance*. Hal ini menarik karena proses kolaborasi yang dilakukan dapat menjadi model implementasi ProKlim di lokasi lain. Secara umum, penelitian berikut bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020.

Penelitian berikut menggunakan metode kualitatif sehingga mampu menggali implementatif. Secara bertahap penulis berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi (Patilima, 2005). Informan dalam penelitian, antara lain: tim *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju sebanyak 5 (lima) orang, penggerak masyarakat Talangbubuk sebanyak 3 (tiga) orang, Lurah Talangbubuk, Camat Plaju, serta Kasi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasanah (2016) menjelaskan bahwa observasi partisipan dilakukan dengan cara ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi untuk mengeksplorasi subyek. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang terlihat mata dan juga informasi yang tersembunyi di balik diri subyek penelitian (Subadi, 2006). Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim serta Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kampung Iklim, kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) menjadi perhatian banyak pihak. Program ini dapat terselenggara melalui partisipasi dari masyarakat minimal setingkat Rukun Warga (RW) atau kampung yang memiliki peran untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Tidak hanya menjadi upaya pengurangan dampak perubahan iklim yang terjadi secara global namun ProKlim turut menjadi penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Selain itu, ProKlim juga menjadi jembatan untuk munculnya *collaborative governance* dalam pengimplementasiannya.

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan mulai intensif dilaksanakan pada awal masa pandemi Covid-19, yaitu: bulan April 2020. Meski demikian, kegiatan yang sesuai aspek adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan dalam penilaian ProKlim telah dilaksanakan sejak lama. Secara masif masyarakat melakukan sejumlah upaya yang ternyata sejalan dengan penilaian ProKlim, khususnya untuk masuk dalam kategori utama. Hal ini turut terjadi pada ProKlim Kelurahan Talangbubuk dimana pada tahun pertama pengusulan telah berhasil memperoleh penghargaan ProKlim Kategori Utama. Keberhasilan tersebut tidak dapat tercapai tanpa kerja sama antar pihak.

Berdasarkan temuan pada studi dokumen dan wawancara, data kemudian diolah dari tahap reduksi data, interpretasi temuan, dan diperiksa keabsahannya melalui triangulasi data, proses *collaborative governance* pada ProKlim Talangbubuk

telah memenuhi 6 (enam) kriteria *collaborative governance*, antara lain dapat dilihat dalam Gambar di bawah:

1. Forum diprakarsai oleh lembaga publik
2. Peserta dalam forum termasuk aktor swasta
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik
4. Terorganisir
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus
6. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik

Gambar 1 enam kriteria *collaborative governance* (Ansell dan Gash, 2007).

Dengan penjelasan sebagai berikut dalam Tabel 1:

Tabel 1. Analisis Enam Kriteria *Collaborative Governance*

No.	Enam Kriteria <i>Collaborative Governance</i>	Implementasi Kriteria dalam ProKlim Kelurahan Talangbubuk
1.	Forum ini diprakarsai oleh lembaga publik.	Forum kelembagaan yang ada di Kelurahan Talangbubuk merupakan hasil prakarsa masyarakat, khususnya yang berada di RT 002 RW 001 Lorong Mari, RT 010 RW 003 Lorong Setia, dan Lorong Mulia I. Forum kelembagaan terwadahi dalam beberapa kelompok yang memiliki fokus bidang dan kekhasan dalam keahlian serta kompetensi. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan dan legalitas kelembagaan, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk mengeluarkan Surat Keterangan (SK) (contoh dalam Gambar 1 terkait pembentukan Struktur Satuan Tugas Covid-19 Ayam Jago) yang mendukung pelaksanaan mitigasi (misal) terhadap penyakit menular. Hasil prakarsa tersebut pun tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan kebijakan dan pendampingan secara intensif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sebagai representasi pemerintah yang ditunjuk langsung untuk implementasi ProKlim.

2. Peserta dalam forum termasuk aktor swasta.	Pada implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk, salah satu pihak swasta yang memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, peningkatan kapasitas, maupun pemberdayaan masyarakat adalah PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. Tahun 2021, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju termasuk dalam forum pembinaan replikasi ProKlim di 10 (sepuluh) lokasi berpotensi ProKlim Kategori Utama untuk mendukung perolehan ProKlim Lestari oleh Kelurahan Talangbubuk (contoh dalam Gambar 2 terkait keterlibatan aktor swasta dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi masyarakat melalui pembuatan pupuk komposter). Implementasi Replikasi ProKlim Menuju ProKlim Lestari. Pelibatan aktor swasta (non pemerintah) ini dapat terselenggara dengan baik apabila sinergi dengan pemerintah baik Pemerintah Kelurahan Talangbubuk maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang pun berjalan serta memiliki visi bersama, yaitu: mewujudkan replikasi ProKlim menuju ProKlim Lestari.
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik.	Pada implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk, setiap peserta dalam forum memperoleh kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya, terutama untuk akselerasi perolehan ProKlim Lestari di tahun 2021.
4. Terorganisir.	Seluruh kegiatan dalam implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk memiliki struktur organisasi yang jelas, kegiatan yang terkontrol, dan dilaksanakannya monitoring serta evaluasi secara berkala.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus.	Pada implementasi ProKlim Kelurahan Talangbubuk, setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan dengan konsensus. Tidak hanya sebagai penerapan musyawarah untuk mufakat namun juga sebagai titik temu dalam merumuskan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik.	Kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Kelurahan Talangbubuk memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: mendukung implementasi ProKlim sesuai peraturan

perundang-undangan dan pemerintah setempat.

Sumber: Analisis Peneliti, 2021.



Gambar 2 Contoh forum yang diprakarsai oleh lembaga publik



Gambar 2. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam forum Implementasi Replikasi ProKlim Menuju ProKlim Lestari.

Berdasarkan temuan yang dianalisis menggunakan 6 (enam) kriteria Collaborative Governance dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat

Kelurahan Talangbubuk pada implementasi ProKlim dapat dikategorikan sebagai proses kolaborasi.

3. Kesimpulan

Collaborative governance dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020 dikategorikan sebagai proses kolaborasi yang apik. Pada penelitian selanjutnya, pengembangan dapat dilakukan proses *collaborative governance* yang lebih detail.

Penghargaan: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju yang telah memfasilitasi untuk penelitian mengenai Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543-571. <http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Goliday, A. M. (2010). Identifying the Relationship Between Network Governance and Community Action Program Participation (Disertasi). Departement Public Policy and Administration, Walden University. Diakses tanggal 18 Mei 2021. dari UMI Dissertations Publishing.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8 (1), 21–46. DOI: 10.21580/at.v8i1.1163
- Patilima. (2005). Teknik Analisis Data. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subadi, T. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiarto, A., Hanifa, M., dan Sarno. (2018). Pemanasan Global di Sumatera Selatan dan Peningkatan Suhu Udara yang Terjadi; Pemodelan Pengaruhnya Terhadap Transpirasi *Lansium Domesticum Corr* (Paper). Indralaya: Jurusan

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Sriwijaya. DOI: 10.31227/osf.io/st4eh.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

PENGEMBANGAN PROGRAM TAKHASUS AL-QURAN DI PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA

Neni Rosita^{1*}

¹ Perguruan Tinggi Islam Tanjab Mauizhan Barat ; nenirosita85@gmail.com

* Correspondence

Received: 23/06/2021; Accepted: 10/07/2021; Published: 11/07/2021

Abstrak: Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan Al-Qur'an yang memiliki kegiatan keagamaan diantaranya menghafal Al-Qur'an. Aktivitas menghafal Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelompok dan mandiri yang dilakukan santri dengan menyetorkan hafalan kepada Kyai dan Ustadz. Sebagai respon positif pondok pesantren terhadap perubahan dan kemajuan zaman dalam sistem pendidikan, maka pondok pesantren mulai melakukan perubahan serta penyesuaian tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, sarana dan prasarana. Pendidikan di Pondok Pesantren Krapyak pada kompleks Ribathul Qur'an wal Qira'at yaitu mementingkan masa depan para santrinya setelah dapat menyelesaikan hafalan dari pondok dengan tujuan menjadi insan Qur'ani. Oleh karena itu, salah satu karakteristik pondok pesantren, disamping mendidik santri tentang ilmu agama, serta lingkungan masyarakat pondok yang mendukung melalui program *takhasus* yang diajarkan di Pondok Pesantren Krapyak mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga dan mengamalkan Al-Qur'an.

Abstract: Islamic boarding school Krapyak Yogyakarta is an educational institution of the Qur'an that has religious activities including memorizing the Qur'an. Al-Qur'an memorization activities carried out in groups and independently carried out by students by depositing memorization to Kyai and Ustadz. As a positive response of Islamic boarding schools to the changes and progress of the times in the education system, Islamic boarding schools began to make changes and adjustments to educational goals, curriculum, teaching methods, facilities and infrastructure. Education at the Krapyak Islamic Boarding School in the Ribathul Qur'an wal Qira'at complex is concerned with the future of the students after being able to finish memorizing from the cottage with the aim of becoming Qur'anic people. Therefore, one of the characteristics of Islamic boarding schools, in addition to educating students about religious knowledge, as well as a supportive boarding community environment through the *takhasus* program taught at the Krapyak Islamic Boarding School is able to make a major contribution in maintaining and practicing the Qur'an.

Kata Kunci: Pengembangan, Takhasus, Pondok Pesantren

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di masa awal perkembangan Islam di Indonesia pengajaran Al-Qur'an yang menjadi pokok. Al-Qur'an diajarkan dari surau-surau oleh orang alim yang merangkap

sebagai imam shalat di surau. Selanjutnya dalam perkembangannya Al-Qur'an diajarkan di pesantren-pesantren, khususnya pesantren tahfizh Al-Qur'an. Berdasarkan direktorat pendidikan Diniyah dan pondok pesantren Depag RI tahun 2004-2005, lembaga tahfizh Al-Qur'an di Indonesia terdapat sekitar 6044 pesantren. Namun demikian, persentase buta baca Al-Qur'an muslim di Indonesia mencapai 54% (bps.go.id diakses 11 Oktober 2018). Data tersebut menunjukkan persentase kurangnya kesadaran masyarakat untuk belajar Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber rujukan paling pertama dan utama dalam ajaran islam. Al Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk di sampaikan kepada umat manusia. Hakikatnya diturunkannya Al-Qur'an adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia untuk memecahkan problema yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak merupakan salah satu pesantren yang berada di Yogyakarta dan memiliki program takhasus Al-Qur'an, yang aktivitasnya berupaya mendalami Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran-ajaran islam dari berbagai dimensi secara kompleks. Cara mendalaminya dengan cara dipelajari dan ditelaah dari berbagai aspek sehingga melahirkan berbagai ilmu yang terkait dengan dimensi-dimensi Al-Qur'an.

Istilah tahfidzul Al-Qur'an dapat diartikan sebagai proses mempelajari Al-Qur'an dengan cara menghafalnya agar selalu ingat dan mengucapkannya di luar kepala tanpa melihat mushaf. Menghafal Al Qur'an sudah dilakukan sejak Al-Qur'an itu diturunkan, dan Al-Qur'an di turunkan kepada Nabi Muhammad yang ummy (tidak dapat membaca dan menulis) yang diutus oleh Allah di kalangan umatnya (Shihab, 1999; 23). Menghafal Al-Qur'an terdiri dari kata menghafal dan Al-Qur'an. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menghafal adalah berusaha meresapkan ke dalam fikiran agar selalu ingat. Al -Hifzh (hafalan) secara bahasa adalah dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Dalam hal ini menghafal Al-Qur'an memeliharanya serta mempelajarinya haruslah memperhatikan tiga unsur pokok yakni menghayati bentuk-bentuk visual sehingga bisa diingat kembali meski tanpa kitab, membacanya secara rutin ayat-ayat yang di hafalkan, mengingat-ingatnya. (Nawabuddin, 2005:25). Sedangkan Menurut Muhaimin (2002;16) yang dimaksud menghafal adalah suatu metode yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah dibaca secara

benar apa adanya. Metode ini sering digunakan dalam usaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits.

Melestarikan, menjaga, dan menyebarluaskan Al-Qur'an sampai saat ini masih terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan pengembangan dari berbagai institusi seperti banyaknya pondok pesantren, taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah dan satuan pendidikan yang juga ikut menyelenggarakan program tahfidz Al-Qur'an. Kemampuan dalam menghafal Al-Qur'an adalah kemampuan yang sangat baik untuk dimiliki. Terutama seorang muslim wajib untuk dapat menghafal ayat-ayat al-Quran, karena membaca Al-Qur'an terutama surat al-fatihah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari shalat. Hukum menghafal Al-Qur'an menurut ulama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dimaksudkan sebagai suatu kewajiban yang ditujukan kepada seluruh orang mukallaf tetapi apabila terpenuhi dan orang yang tidak mengerjakan tidak dituntut lagi untuk mengerjakannya. (Nasrum Hanum, 1996:229). Aktivitas menghafal Al-Qur'an membutuhkan keajegan dan integritas selama prosesnya (Anna, M. Gade : 38). Proses tersebut tergambar dalam keseharian santri saat yang menghafal Al-Qur'an lalu disetorkan kepada pak kiai atau ustadz. Setelah itu mengulang-ulang hafalan yang sudah disetorkan, agar lancar dan tetap terjaga hafalannya. Keberhasilan program tahfiz Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh manajemen waktu menghafal yang baik dan metode tahfiz Al-Qur'an.

Pondok Pesantren Krapyak yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak yang didirikan oleh KH Mohammad Munawwir, terletak sekitar 7 km di sebelah utara dari pusat kota Kabupaten Bantul. Tepatnya, di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, sekitar 2 km di sebelah selatan Kraton Yogyakarta. Pondok pesantren Al Munawwir sendiri dikenal dengan istilah pondok pesantren salaf yang artinya mengajarkan syari'at islam secara murni tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan. Seiring berjalannya waktu pondok pesantren tidak hanya mengkhususkan pendidikannya dalam segi Al-Qur'an namun merambah ke ilmu-ilmu lain seperti kitab kuning yang kemudian dikemas dalam sistem madrasah (klasikal). Madrasah ini sendiri melahirkan lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya madrasah salafiyah, Al- Maa'had, Aly, Madrasah Huffadh 1 dan 2, Majelis Ta'lim dan Majelis Tarjih. Pondok Pesantren Al Munawwir merupakan lembaga pendidikan Al-Qur'an yang memiliki kecenderungan membangun sebuah relasi

suci antara kiai (guru) dan santri (murid). Aktivitas menghafal Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelompok dapat menumbuhkan ikatan emosional yang kuat, karena menghafalkan Al-Qur'an memerlukan waktu yang lama. Pengajian Al-Qur'an berlangsung cukup intens, sehingga membentuk pribadi yang bermoral dan kesadaran sosial yang melekat dalam kepribadian seorang penghafal Al-Qur'an (Turner, 1996; 125).

Pondok Pesantren Al Munawwir dikenal sebagai pondok pesantren Al-Qur'an. Hal ini karena materi pokok yang diberikan kepada santri-santrinya adalah Al-Qur'an dengan segala ilmunya. Kekhususan inilah yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren. Pendirinya yang dikenal sebagai ulama Al-Qur'an ternyata menjadi unggulan komperatif pesantren jika dibanding dengan pesantren lainnya yang ada di Yogyakarta. Pondok Pesantren Al Munawwir terbagi menjadi beberapa kompleks, kompleks putra yang terdiri dari kompleks-kompleks putra yang terdiri dari kompleks AB, kompleks T, kompleks Arofah, kompleks CD, Komplek EF, Komplek GIPA Al-Qasim, kompleks IJ, kompleks K1, kompleks k2, Komplek L, kompleks M, madrasah Huffad 1, Madarasah Huffad 2, Nurussalam putra dan Ribathul Qur'an wal Qira'at Putra. Sedangkan kompleks putri di pondok pesantren Al-Munawwir terdiri dari kompleks Q, Komplek R1, kompleks R2, Nurussalam putri dan *Ribathul Qur'an wal Qira'at* Putri. Dalam hal ini yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai obyek penelitian yakni kompleks *Ribathul Qur'an wal Qira'at* putra dan *Ribathul Qur'an wal Qira'at* putri.

2. Hasil Penelitian

Komplek *Ribathul Qur'an wal Qira'at* merupakan tempat khusus untuk santri yang menghafal Al Qur'an saja. Santri diharapkan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta sesuai dengan tajwid dalam menghafal Al-Qur'an. Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menjadi motor penggerak sebagai wadah penghafal Al-Qur'an melalui program *takhasus* Al Qur'an.

Tujuan dan Langkah Pengembangan Takhasus Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

- Tujuan Takhasus Al-Qur'an

Dalam merencanakan suatu program pasti terdapat dasar dan tujuan yang akan di capai dalam program tersebut begitu juga dengan takhasus Al-Qur'an. Sedangkan tujuan yang diharapkan sebagai hasil

dalam pengembangan *takhasus* Al-Qur'an adalah santri dapat menghafal, dan mengamalkan Al-Qur'an.

- Pengaturan jadwal setoran dan hafalan

Pengaturan jadwal dilakukan oleh lurah pondok yang diberi jadwal kegiatan harian, mingguan, bulanan. Santri di beri jadwal sesuai tingkatan menghafal dapat berapa juz. Untuk jadwal pengajian dan setoran hafal di buat oleh pengurus dan sudah di setuju oleh ustadz dan Pak kyai. Jadwal pengajian di atur agar santri dapat melaksanakan dengan baik dan efektif untuk di lingkungan pesantren.

- Kurikulum *Ribathul Qur'an Wal Qir'aat*

Sesuai dengan cita-cita *muasis* pondok pesantren Al munawwir Krapyak Yogyakarta, yakni KH.M. Moenawwir, untuk membumikan Al Quran, maka madrasah *Huffad* dan *Ribathul Qur'an wal Qira'at* ini memfokuskan pengajian dengan materi hafalan Al Qur'an (profil pondok pesantren).

Kegiatan seperti *muroja'ah*, *takror*, dan simaan bersama yang merupakan kegiatan untuk membumikan Al-Qur'an nusantara ini sudah menjadi agenda yang sangat penting bagi masyarakat santri. Selain untuk mengikuti acara rutin juga sebagai ajang untuk *tahsinul* Qur'an membenahi bacaan Al-Qur'an dengan cara menyimak para qori' yang sedang bertugas membaca Al Qur'an. Hal ini dapat mengoreksi apakah bacaan yang selama ini sudah sesuai dengan tajwidnya atau belum, juga sebagai salah satu cara *takror* atau mengulangi hafalan Al-Qur'an bagi qori, dengan menghafal ulang di depan para qori' yang lain juga disimak oleh para santri-santri, dalam simaan Al-Qur'an santri dilatih untuk dapat mendengar dan menyimak bacaan teman yang sedang membaca Al-Qur'an dan santri dapat mengoreksi jika dapat kekeliruan dalam membaca.

Target dan Metode dalam menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

- Target Dalam Menghafal

Target menurut Yusuf al- Uqshari (dalam Abdurrahman, 2012:108) target adalah impian yang ingin di wujudkan. Ia merupan sebuah mimpi yang bisa dirasakan dan digapai.semua bermula dari

mimpi atau imajinasi, James Allen berkata “bermimpilah setinggi langit. Dan seperti yang kau impikan, begitulah engkau akan menjadi. Visimu adalah janji akan menjadi apa dirimu. Cita-citamu adalah ramalan mengenai apa yang pada akhirnya akan kau perlihatkan.” Lebih lanjut Risfan Munir (2012;109) menerangkan dan menyarankan agar impian terasa secara psikologis dan menggugah motivasi, sebaiknya dalam imajinasinya digambarkan pula manfaat dan kenikmatan yang dirasakan. Jadi bukan sekedar menggambarkan ukuran-ukuran dan fitur hasil (*output*), tetapi juga manfaat yang bisa dirasakan (*outcome*). Latihan percepatan dalam meraih target dalam program tahfidz Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1). Perankan diri anda sebagai seorang penghafal Al-Qur'an yang hebat, dan memiliki kehendak untuk memenuhi nilai-nilai terdalam (hal yang esensi dan urgen, dapat ditunjukkan melalui reaksi emosional anda tidak memainkan peran). Cari moment yang tepat untuk menempatkan peran itu dalam tujuan anda.
- 2). Melintasilah di lintasan yang tepat. Perhatikan rute jalan yang akan anda lewati untuk mencapai target. Melintasilah di atas lintasan itu dengan kecepatan maksimal sehingga akan berdampak positif pada mental anda, yaitu dengan mengetahui runtutan peristiwa yang terjadi pada lintasan anda. Buatlah tanda. Perhatikan atau tandai situasi dan kondisi atau kapan anda dapat mencapai target dalam program tahfidz Al-Qur'an. Kemudian kembalilah ke masa sekarang. (Abdurrahman al asy'ari, 2017:121). Menurut Yusuf Al Uqshari (dalam abdurrahman, 2012:108) target adalah impian yang ingin diwujudkan. Ia merupakan sebuah mimpi yang bisa dirasakan dan digapai. Semula bermula dari mimpi dan imajinasi, James Allen berkata “bermimpilah setinggi langit. Dan seperti yang kau impikan, begitulah engkau akan menjadi. Visimu adalah janji akan menjadi dirimu.

Cita-citamu adalah ramalan mengenai apa yang pada akhirnya akan kau perlihatkan.” Lebih lanjut Risfan Munir (dalam Abdurrahman Al-Asy'ari, 2012: 109) menerangkan bahwa agar impian terasa secara psikologis dan menggugah motivasi, sebaiknya dalam imajinasi digambarkan pula manfaat dan kenikmatan yang anda rasakan. Ada tujuh langkah latihan visualisasi atau berimajinasi yang disarankan.

Halaqoh di kompleks Ribathul Qur'an wal Qiraat di susun oleh pengurus kompleks, kegiatan ini rutin dilakukan pada rabu sore bakda ashar. Adapun peserta disetiap kelompok halaqoh terdiri dari empat santri. Pembagian ini dimaksudkan agar setiap kelompok yang terdiri dari empat santri tersebut bisa saling bekerja sama satu sama lain, dimana setiap kelompok harus mengkhhatamkan satu juz dalam setiap pertemuan. Masing-masing santri agar bisa merasakan dan dapat mengkhhatamkan satu juz dalam setiap *halaqoh* tersebut.

Dengan pembagian tersebut, maka setiap santri kebagian membaca seperempat juz bil ghaib. Selain itu juga diwajibkan menjadi *mustami'* pada tiga perempat juz yang dibaca oleh teman kelompoknya. Santri yang kebagian membaca seperempat juz akan dikoreksi bacaannya oleh 3 santri yang lain., sedangkan santri yang mengoreksi dibolehkan untuk membuka mushafnya agar kesalahan kesalahan qori' bisa langsung diketahui dan dibenarkan. Halaqoh di kompleks Ribathul Qur'an wal Qiraat telah disusun secara sistematis. Dalam hal ini pada setiap kelompok mempunyai siklus perputaran pembagian dalam satu bulan. Masing2 santri akan kebagian seperempat juz yang pertama, kemudian di minggu kedua ia kebagian seperempat juz yang kedua, dan seterusnya hingga satu bulan ia telah mengcover satu juz penuh. Siklus dengan metode bergilir membaca itu akan kembali lagi jika berganti bulan, akan tetapi dengan juz yang berbeda. Sederhananya, santri yang istiqomah mengikuti halaqoh akan menyelesaikan satu juz penuh setiap satu bulan. Jika berganti bulan maka berganti pula materinya, misalnya jika bulan pertama satu kelompok tersebut bermaterikan juz satu, maka bulan kedua materinya akan ganti juz dua. Dalam setiap proses dari program kegiatan-kegiatan santri dalam menjaga hafalan, memiliki target dan keinginan untuk selesai tepat waktu. Sebelum melaksanakan program kegiatan tersebut seorang pimpinan pesantren terlebih dahulu mengelompokkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelatihan tersebut dengan adanya pengelompokan tersebut, maka pelatihan akan berjalan dengan baik.

Target yang ditetapkan dari pondok mengharuskan santri untuk dapat menghafal Al Qur'an sekurang-kurangnya 5 juz dalam satu semester, dengan harapan 3 tahun hafalan bisa terselesaikan bagi santri

yang mondok di Ribathul Qur'an wal Qira'at. Sedangkan target dari santri biasanya mempunyai target sendiri sesuai dengan capaian dan cita-cita dan impian ke depan untuk dapat melakukan kegiatan yang lain setelah dapat mengkhhatamkan Al-Qur'an. Sehingga diperlukan motivasi yang besar dalam menghafal. Motivasi dari diri sendiri, dan orang tua serta lingkungan yang menuntut untuk dapat menghafal Al-Qur'an dan berdakwah di daerah sendiri. Menjadikan orang tua sebagai motivasi terbesar untuk menghafal Al-Qur'an. Karena sesungguhnya orang yang menghafal Al-Qur'an sangat dicintai Allah.

- Metode Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

Metode yang digunakan dalam menghafal Al-Qur'an setiap santri berbeda. Beberapa santri menggunakan metode yang di dapat dari guru sebelumnya, ada juga yang menggunakan metode yang di ciptakan sendiri dan meniru dari orang lain yang pernah ditemui atau di pelajari secara otodidak. Untuk metode di pondok Ribathul Qur'an masih menggunakan metode klasik dan metode yang diaplikasikan oleh santri sesuai dengan kesesuaian dengan kecepatan dalam menghafal Al Qur'an.

Dalam perencanaan takhasus juga ada rapat pengurus bersama pengasuh sebulan sekali atau selapanan atau tiga puluh lima (35) hari untuk melakukan evaluasi dan perencanaan dalam kegiatan mengaji dan mempercepat pencapaian target santri dalam menghafal Al Qur'an (Wawancara, 03 Januari 2019). Kemudian rapat antar pengurus dilakukan pada setiap bulan diminggu pertama untuk pembuatan dan pembagian kelompok mengaji. Dalam hal ini pengurus biasa nya membagi berdasarkan tingkat hafalan dan berapa juz yang sudah di hafal oleh santri. Adapun untuk rapat tahunan biasanya dilakukan pada acara haul dan khataman setiap bulan Rabiul Awal setiap tahunnya. Santri putra dan putri terkhusus pengurus melakukan rapat tahunan dan membentuk panitia dalam rangka haul dan khataman seluruh komplek yang ada di lingkungan pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Pengorganisasian Takhasus Al-Qur'an Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Pengorganisasian yang merupakan suatu alat untuk mencapai apa yang sudah direncanakan di bawah bimbingan dan wewenang pemimpin maka suatu perencanaan akan dapat tercapai dengan maksimal karena sudah dikelompokkan dan sudah ada yang bertanggung jawab pada masing-masing kelompok. Kegiatan pengorganisasian meliputi pembagian tugas kerja pengurus. Pembagian aktivitas pengelompokkan jadwal mengaji santri, dan pengaturan struktur organisasi. Sehingga pemimpin mudah dalam mengontrol sesuai dengan tugasnya. Pembagian tugas kepengurusan di atur oleh pengasuh yakni romo yai sebagai Pembina kompleks Ribathul Qur'an Wal Qira'at. Pengurus mempunyai tugas sesuai dengan pembagian kepengurusan yang telah di pilih oleh pengasuh dan lurah pondok selama satu tahun. Pengurus bertugas mengontrol santri mulai dari kegiatan sehari-hari, mengaji dan menyetorkan hafalan.

Suatu organisasi yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang jelas, satu arah sesuai visi-misi, dan tujuan, dan perumusan harus dijelaskan secara rinci, memiliki struktur organisasi sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dan teratur sesuai tugasnya masing-masing, seimbang antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kerjasama antar pengurus dan pengasuh merupakan sarana untuk mempermudah, mempercepat proses menghafal dan meminimalisir hambatan serta meningkatkan hasil dan kualitas hafalan. *Halaqoh* yakni kegiatan mengaji bersama yang dilaksanakan oleh santri dalam rombongan yang digunakan untuk mempercepat hafalan santri dengan target yang sudah di buat dan harus dilaksanakan oleh pribadi masing santri. Kata *halaqoh* berasal dari bahasa arab, *Halaqah* yang berarti lingkaran. Kalimat *halqah min al nas* artinya kumpulan orang yang duduk. *Halaqah* sendiri dikenal dalam berbagai istilah, ada yang menyebutnya dengan *usrah* (keluarga), karena metode *halaqah* ini lebih bersifat kekeluargaan. Ada pula yang menyebutnya dengan *liqa'* (bertemu) (dokumen pondok pesantren 2018). *Halaqah* adalah sebuah istilah yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan atau pengajaran islam yang menggunakan metode tradisional (pesantren salaf). Istilah *halaqah* (lingkaran) biasanya digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil santri yang secara rutin mengkaji ajaran islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12 orang. Mereka mengkaji islam dengan *manhaj*

(kurikulum) tertentu. Biasanya kurikulum tersebut berasal dari *murabbi/naqib* yang mendapatkannya dari jamaah yang menaungi *halaqah* tersebut. *Halaqoh* di kompleks Ribathul Qur'an wal Qiraat di susun oleh pengurus kompleks, kegiatan ini rutin dilakukan pada rabu sore *bakda* ashar. Adapun peserta disetiap kelompok *halaqoh* terdiri dari empat santri. Pembagian ini dimaksudkan agar setiap kelompok yang terdiri dari empat santri tersebut bisa saling bekerja sama satu sama lain, dimana setiap kelompok harus mengkhhatamkan satu juz dalam setiap pertemuan. Masing-masing santri agar bisa merasakan dan dapat mengkhhatamkan satu juz dalam setiap halaqoh tersebut.

Dengan pembagian tersebut, maka setiap santri kebagian membaca seperempat juz *bil ghaib*. Selain itu juga diwajibkan menjadi *mustami'* pada tiga perempat juz yang dibaca oleh teman kelompoknya. Santri yang kebagian membaca seperempat juz akan dikoreksi bacaannya oleh 3 santri yang lain, sedangkan santri yang mengoreksi dibolehkan untuk membuka mushafnya agar kesalahan kesalahan *qori'* bisa langsung diketahui dan dibenarkan. *Halaqoh* di kompleks Ribathul Qur'an wal Qiraat telah disusun secara sistematis. Dalam hal ini pada setiap kelompok mempunyai siklus perputaran pembagian dalam satu bulan. Masing2 santri akan kebagian seperempat juz yang pertama, kemudian di minggu kedua ia kebagian seperempat juz yang kedua, dan seterusnya hingga satu bulan ia telah mengcover satu juz penuh.

Siklus dengan metode bergilir membaca itu akan kembali lagi jika berganti bulan, akan tetapi dengan juz yang berbeda. Sederhananya, santri yang istiqomah mengikuti *halaqoh* akan menyelesaikan satu juz penuh setiap satu bulan. Jika berganti bulan maka berganti pula materinya, misalnya jika bulan pertama satu kelompok tersebut bermaterikan juz satu, maka bulan kedua materinya akan ganti juz dua. Suatu program yang bagus pasti memiliki ujian sebagai acuan dalam standar evaluasi. Begitupula *halaqoh* di kompleks Ribathul Qur'an wal Qira'at. dalam satu semester yaitu enam (6) bulan, satu santri diwajibkan mengikuti ujian *halaqoh* yang berupa simaan 5 juz. Santri yang tidak bisa melewati ujian simaan lima(5) juz tidak diperkenankan berganti ke materi degan juz diatasnya.

Dari peraturan yang ada di *halaqoh* yang dijalankan oleh pengurus kompleks, lurah pondok sebagai penanggung jawab dan di bimbing oleh Romo Yai dan di Ridhoi Allah Swt. Semoga dapat mengantarkan santri dalam proses tahfidznya dalam waktu tiga tahun menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Bisa mengantar santri menggapai amanah dan bertanggung jawab besar yaitu menjadi hafidz/hamilul Qur'an.

Manajemen Takhasus Al Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

Alasan yang paling utama pelaksanaan manajemen takhasus di Pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah karena merupakan lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah, sekaligus lembaga penghafal Qur'an yang mencetak santri untuk generasi penghafal Al-Qur'an. Dengan harapan, menjadi output yang mampu mengamalkan ajaran-ajaran Al Qur'an. Manajemen takhasus Al Qur'an merupakan suatu proses pendayagunaan sumber-sumber daya yang ada di pondok pesantren, yang meliputi: pengasuh, dewan asatidz, pengurus pondok, sarana dan prasarana, lembaga pendidikan pesantren, pembiayaan, santri/santriwati supaya terpusat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Diantara banyaknya tujuan pendidikan pesantren adalah untuk mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, mandiri, menyebarkan atau menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam dan mencintai Al Qur'an serta tentang target dalam menghafal Al-Qur'an.

Para ulama dan kader pesantren merupakan *agent of change* yang dapat berpotensi menggali hal tersebut dengan otoritas yang baik. Khasanah Islam tentang lingkungan perlu digali lalu dikembangkan sebagai bentuk implementasi kekuatan ajaran Islam dalam melestarikan dan menjaga Ciptaan-Nya sebagai amanah.

Perencanaan Takhasus Al Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

Perencanaan harus bermakna, maksudnya dengan rencana-rencana usaha yang akan dilakukan, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Artinya adalah perencanaan tersebut harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, dimana dengan arah dan tujuan tersebut akan menghasilkan kegiatan yang lebih baik. Perencanaan haruslah mempunyai kegunaan dan manfaat, artinya program *takhasus* yang dibuat haruslah sesuai dengan target pondok pesantren. Dengan kesesuaian tersebut seorang santri akan lebih

mudah untuk menyelesaikan hafalannya. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam perencanaan di Pondok Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at, yaitu:

- a) Apa yang akan dicapai berhubungan dengan penentuan tujuan. Perumusan tujuan didasarkan pada tujuan Pondok Ribathul Qur'an wal Qira'at yang disesuaikan dengan visi dan misi Pondok Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at.
- b) Mengapa hal itu perlu dilakukan, berhubungan dengan alasan perlunya jenis-jenis kegiatan *takhasus* dilaksanakan.
- c) Bagaimana akan dilaksanakan, berhubungan dengan prosedur kerja, sasaran dan biaya.
- d) Ketika akan dilaksanakan, berhubungan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau pelaksanaan kegiatan, tahap-tahap kegiatan sampai dengan selesai.
- e) Siapa yang akan melaksanakan, berhubungan dengan target dan motivasi menghafal
- f) Mengadakan evaluasi, berhubungan dengan target dan motivasi menghafal.

Pelaksanaan Takhasus Al Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk menggerakkan orang lain agar suka dan dapat bekerja dalam mencapai tujuan. Dalam pengertian di atas juga menekankan agar dalam penggerakan sedapat mungkin menggunakan cara yang tepat yaitu dengan cara memodifikasi atau memberi motif-motif atasan kepada bawahan agar mereka mau dan senang melakukan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena tanpa adanya pelaksanaan, tidak akan mungkin hasil perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan dengan efektif. Dalam aktivitas santri di Pondok Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at dalam menghafal Al Qur'an penggerakan dapat dikatakan berjalan apabila mempunyai perencanaan dan pengorganisasian. Untuk mencapai tujuan tersebut harus melakukan tahapan-tahapan diantaranya adalah perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pengawasan Takhasus Al Qur'an di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian atau mengetahui tingkat keberhasilan dari program-program *takhasus* yang telah dilaksanakan. Pengasuh Pondok Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at melakukan pengawasan terhadap para ustadz/ustadzah, santri dan warga pesantren. tanpa adanya pengawasan, tidak akan dapat mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan dan juga tidak dapat menyusun rencana yang lebih baik dari segi hasil pengalaman yang lalu. Simaan ini merupakan kegiatan rutin pondok yang telah dilakukan secara turun temurun. Kegiatan seaman ini adalah salah satu kegiatan dari sekian banyaknya kegiatan yang diselenggarakan Pondok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al Qur'an secara tartil dan melatih mental keberanian untuk tampil di depan publik.

3. Kesimpulan

Pondok pesantren Al Munawwir merupakan lembaga pendidikan Al-Qur'an yang memiliki kecenderungan membangun sebuah relasi suci antara kiai dan santri. Aktivitas menghafal Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelompok dapat menumbuhkan ikatan emosional yang kuat, karena menghafalkan Al-Qur'an memerlukan waktu yang lama. Pengajian Al-Qur'an berlangsung cukup intens, sehingga membentuk pribadi yang bermoral dan kesadaran sosial yang melekat dalam kepribadian seorang penghafal Al-Qur'an. Aktivitas menghafal Al-Qur'an membutuhkan keajegakan dan integritas selama melalui prosesnya. Proses tergambar dalam aktivitas keseharian santri menghafal Al-Qur'an, lalu disetorkan kepada kyai. Setelah itu mengulang-ulang hafalan yang sudah disetorkan agar lancar dan tidak hilang hafalannya.

Keyakinan terhadap keberkahan yang didapatkan melalui para pemegang otoritas agama dalam hal ini adalah pengajar Al-Qur'an. Turut mempengaruhi perilaku individu setiap santri. Sehingga perilaku tersebut merupakan bentuk nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh santri. Kegiatan yang diadakan diserambi masjid pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, kegiatan ini dimulai *bakda* isya. Kemudian diikuti oleh santri-santri pondok Krapyak baik dari Al Munawwir maupun dari Ali maksum. Sesuai dengan peserta, waktu, tempat, dan kuantitas *maqra'* (bacaan). Dengan demikian, *takhasus* diharapkan mampu

menjadi program aplikatif dalam mendorong tumbuhnya generasi penghafal di Indonesia khususnya Yogyakarta. *Takhasus* adalah suatu program pondok pesantren yang dilakukan di Pondok Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at bertujuan untuk mendorong santri dalam peningkatan menghafal, menjaga, kepedulian, kesadaran dan peran serta aktif warga pondok pesantren terhadap upaya-upaya menjaga dan mengamalkan Al Qur'an berdasarkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebagai respon positif dari pesantren terhadap perubahan dan kemajuan zaman dalam modernisasi sistem pendidikan, maka pondok pesantren telah memulai melakukan perubahan dan penyesuaian, baik menyangkut tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, sarana pendidikan. Terjadinya modernisasi dalam sistem pendidikan pesantren bukan berarti bahwa semua elemen-elemen atau unsur-unsur yang menjadi ciri khusus dari sebuah pesantren tersebut mengalami perubahan dibuang atau dihilangkan. Dari beberapa uraian di atas, bahwa melalui program takhasus yang diajarkan di Pondok Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga dan mengamalkan Al-Qur'an, serta menjadi hamilul Qur'an yang diridhoi Allah SWT.

Referensi

- Abdillah, Pius dan Dahlan Al Barry. 2009. *Kamus Lengkap Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Arkola.
- Abdullah, Irwan dkk. 2008. *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrah, Nawabuddin. 2005. *Teknik Menghafal Al-Qur'an Kaifa Tahfidzul Qur'an*. Bandung : Sinar Baru Ajen Sindo.
- Ahmad Warson Munawwir. 2005. *Almunawwir kamus bahasa arab-Indonesia*, Surabaya : Progresif.
- Akhyar, Syaiful Lubis. 2007. *Konseling Islami: Kiai dan Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Ali, Nizar dan Ibi Syatibi. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam; Ikhtiar Menata Kelembagaan Pendidikan Islam*. Bekasi: Pustaka Isfahan.
- Al-Qosimi, Abu Hurri. 2014. *Anda Pasti Bisa Hafal Al-Qur'an Metode Al-Qosimi*. Solo: Al- Hurri
- Anwar Muhamad Ali. 2017. *Manajemen Kelembagaan Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta : Bumi Aksara

Arifin, Zainal. 2012. *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi & Lia Yuliana. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Rev.ed)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asmani Jamal Ma'mur, 2011. *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Bisri Mustofa .2015. *Pesantren Nalar dan Tradisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bryan S. turner,. *Religious authority and new media, theory culture society*, 2007.

Daftar tambahan

Daryanto dan Agung Suprihatin. 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gava Media

Denny, Frederick. 1989. *Qur'an recitation. A Traditional Of Ora Performance And Transmission" Ora Traditional : Center Of Studies In Oral Tradition* Januari vol 4.

Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.

Departemen Agama RI. 2004. *Panduan Organisasi Santri*. Jakarta: CV Kathoda

Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Proyek Peningkatan Pondok Pesantren. 2000. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama

Diyah, Winanti. 2014. *Model Pengembangan Program Takhsus Al-Qur'an Sebagai Pendukung Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Tesis. UIN Malang. Tidak diterbitkan.

Djunaidi A. Syakur (dkk.). 2001. *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*. Yogyakarta: Pengurus Pusat Pndok Pesantren Al-munawwir Yogyakarta.

Fathurohman,M. Mas'udi 2011. *Romo Kyai Qodir : Pendiri Madrasatul Hufadh Pondok Pesantren Al Munawwir*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Gade, Anna M. 2004. *Perfection Makes Practice*. Honolulu : Hawai Press.

Haedari, Amin. 2004. *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Halim, dkk. 2005. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

- Hamalik, Oemar. 2015. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husni, Rahim. 2001. *Arah Baru pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Ma'arif, Syamsul. 2015. *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Machali, Imam, dan Ara Hidayat. 2012. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadiana
- Maunah, Binti. *Tradisi Intelektual Santri*. Yogyakarta: Penerbit TERAS. 2009.
- Muhdir. 2018. *Sistem Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Dengan Metode Al-Qosimi Di Sekolah Dasar Islam Al-Mujahidin Cilacap*. Tesis. IAIN Purwokerto Tidak diterbitkan.
- Patoni, Ahmad. 2003. " *Modernisasi Pendidikan di Pesantren*" Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pupuh Fatkhurrahman. 2002. "*Pengembangann Pondok Pesantren (Analisis Terhadap Keunggulan Sistem Pendidikan Pesantren Terpadu)*", Lektur, seri XVII
- Qamar, Mujamil. 2008. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga
- Qomar, Mujamil. 2005. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Saefullah. 2014. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarijo, Marwan. 1980. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Darma Bhakti.
- Satibi, Imam. 2016. *Manajemen Stratejik Pengembangan Unggulan Vocational School*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Shihab, Quraish. 2007. *Membumikn Al-Qur'an* . Bandung : Pustaka Mizan
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujdana, Nana. 2005. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Remaja Dskarya

- Sulistiyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras.
- Terry, G.R. dan L.W. Rue. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tim Penyusun KBBI. 2002. *Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta Timur: Bumi Aksara
- Zaimsyah, Rahmi. 2017. *Evaluasi pengembangan program Tahfidz di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah . tidak diterbitkan
- Zamakhsyari Dhofier. 2011. *Tradisi Pesantren (Rev.ed)*. Jakarta: LP3ES.
- Zulfi Mubarak. 2006. *Konspirasi Politik Elit Tradisional Di Era Reformasi*, Malang : Aditya Media.
- Miles, Matthew B. dan Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Umam, Khaerul. 2014. *Manajemen Perkantoran: Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi*. Bandung: Pustaka Setia
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta Timur: Bumi Aksara
- Satibi, Imam. 2016. *Manajemen Strategik Pengembangan Unggulan Vocational School*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : Ruzz Media.
- Panglaykim, J. dan Hazil Tanzi. 1191. *Manajemen suatu pengantar*. Jakarta : Ghalia Indah
- George. R. Terry. 1993. *The Principle Of Management*. New York: American Council on Education



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

MEMAHAMI PERILAKU MISKIN MASYARAKAT DESA SENGKERANG, LOMBOK TENGAH: UPAYA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN

Siti Aminah^{1*}

¹ UIN Mataram; aminah.sosiolog@gmail.com

Received: 11/07/2021; Accepted: 03/08/2021; Published: 04/03/2021

Abstrak: Persoalan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah di Indonesia. Semakin banyak program pembangunan yang digelontorkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan justru semakin menambah deretan angka kemiskinan tersebut. Berbagai metode dan upaya yang disalurkan melalui kebijakan pemerintah dalam rangka mensuplai perekonomian masyarakat masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Bidikan pemerintah yang disalurkan berupa uang tunai, penambahan modal usaha, memberikan barang dan jasa, mendanai biaya pendidikan dan berbagai upaya lainnya justru membentuk masyarakat menjadi individu yang mempunyai sikap dan mentalitas miskin. Artinya dalam merespon program-program yang dirancang pemerintah, masyarakat justru hanya tertarik secara *financial* untuk memperoleh bagian dari program tersebut tanpa memahami tujuan dan *out put* yang diharapkan pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah angka kemiskinan semakin meningkat karena masyarakat justru berlomba-lomba memperlihatkan dan mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat miskin. Dalam konteks ini maka yang dibutuhkan bukan hanya program yang bersifat konten, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah pembangunan pemahaman dalam rangka merubah sikap mental masyarakat untuk tidak bangga menjadi objek pembangunan tetapi dapat bertransformasi sebagai subjek yang dapat melakukan pembangunan. Oleh karena itu dalam melihat dan mengkaji persoalan tersebut penulis melakukan penelitian di Desa Sengkerang, Lombok Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menjelaskan perilaku miskin yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam rangka mendoktrin pemahaman lingkungan sekitar tentang kodisinya.

Abstract: The problem of poverty is still a concern of the government in Indonesia. However, the more development programs that are launched in the context of alleviating the poverty rate, it will only add to the series of poverty numbers. Various methods and efforts channeled through government policies in order to supply the community's economy have not shown significant results. The government's aim which is channeled in the form of cash, additional business capital, providing goods and services, funding education costs and various other efforts has actually formed people into individuals who have poor attitudes and mentality. This means that in responding to programs designed by the government, people are only interested in financially to get a part of the program without understanding the goals and outputs expected by the government. So what happens is that the poverty rate is increasing because people are actually competing to show and present themselves as poor people. In this context, what is needed is not only a program that is content, but what is more important than that is the development of understanding in order to change the mental attitude of the community not to be proud to be an object of development but to be transformed as a subject that can carry out development. Therefore, in seeing and reviewing these problems, the author conducted research in Sengkerang Village, Central Lombok. By using a descriptive qualitative approach to understand and explain the poor

behavior shown by the community in order to indoctrinate the understanding of the surrounding environment about their condition.

Kata Kunci: Kemiskinan, Perilaku Miskin, Persaingan Ekonomi

1. Pendahuluan

Dalam menjalin kehidupan sosial kemasyarakatan selalu diliputi dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) memandang kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (Laporan BPS: 2021)

Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan keselarasan antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun komitmen yang sama. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan pernah memperlihatkan hasil yang optimal apabila tidak diwujudkan oleh masyarakat. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya bangkit dari keadaan miskin. masalah kemiskinan muncul tidak semata-mata karena banyaknya pengangguran akibat sempitnya lapangan pekerjaan, perilaku konsumtif, ataupun kurangnya keterampilan tetapi pola pikir seseorang juga sangat berpengaruh dalam permasalahan kemiskinan. Pola pikir yang menganggap bahwa kemiskinan adalah takdir yang harus diterima tanpa adanya usaha untuk mau berubah merupakan akar dari masalah yang melahirkan perilaku malas, dan pasrah pada keadaan sehingga yang terjadi adalah kemiskinan sulit diatasi. Dalam kondisi ini apapun jenis bantuan dan program yang digelontorkan oleh pemerintah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beberapa hari saja selebihnya, tentu akan kembali pada kondisi awal. Kecendrungan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa uang tunai, biaya

pendidikan, paket sembako, modal usaha justru melahirkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena yang tidak mendapatkan bantuan juga merasa bahwa dirinya dalam kondisi miskin. sehingga merasa layak dan berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hasilnya adalah masyarakat berlomba-lomba membangun citra diri sebagai orang miskin

Perilaku miskin adalah sikap dan mentalitas masyarakat yang memperlihatkan kondisinya sebagai orang yang kurang atau tidak mampu baik secara sosial dan ekonomi. Menurut Robert Chambers terdapat lima dimensi kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut: yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri yakni kondisi ketidakmampuan dalam hal pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. (2) ketergantungan, ketergantungan yang dimaksudkan disini adalah terbatasnya kemampuan individu atau kelompok dalam akses sosial dan ekonomi sehingga selalu membutuhkan pihak lain. (3) keterasingan atau kadar isolasi, secara umum keterasingan seringkali terjadi karena lokasi yang terpencil dan jauh dari mobilitas penduduk. Akan tetapi keterasingan juga dapat dilahirkan oleh sebuah pranata sosial yang dalam beberapa kondisi mengakibatkan individu atau kelompok terasingkan. Salah satunya adalah karena kondisi miskin tersebut. (4) Kerentanan dalam menghadapi situasi darurat, kondisi ini disebabkan karena masyarakat miskin tidak mempunyai persiapan atau bekal dalam menghadapi kemungkinan akan adanya kesulitan dari suatu kondisi yang tidak terduga. Bagaimana tidak persiapan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah lemah, apalagi persiapan dalam menghadapi situasi demikian. (5) ketidakberdayaan (*powerless*), persoalan ini merupakan indikasi lebih lanjut dari kemiskinan. Artinya rendahnya kemampuan dalam menghasilkan pendapatan berdampak pada lemahnya kekuatan sosial seorang individu atau masyarakat sehingga menempatkan masyarakat pada posisi tidak berdaya (Chambers: 1987). Berdasarkan lima dimensi tersebut kemiskinan merupakan persoalan yang lahir dari permasalahan ekonomi yakni kelemahan individu atau kelompok dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal misalnya lemahnya hasil produksi, kurangnya jaringan sosial, skill yang tidak memadai dan banyak kekurangan-kekurangan lainnya. kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit dan harus dapat dikurangi dan diatasi. Kemiskinan bukan semata merujuk pada masalah kekurangan ekonomi tetapi mencakup lemahnya kehidupan sosial. dengan

demikian mengatasi kemiskinan bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) tetapi harus menyediakan mekanisme yang tepat untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut. Sehingga diperlukan sebuah penanganan yang tepat dan membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut.

Belakangan ini skema kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan transfer uang atau barang seperti bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin) Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain sebenarnya bukan program yang gagal, meskipun tidak sepenuhnya mampu menanggulangi kemiskinan. Artinya banyak juga masyarakat yang terbantu dengan adanya program tersebut. Tetapi masalahnya adalah sikap masyarakat dalam merespon bantuan tersebut. Dengan mengharapkan bantuan pemerintah, maka semakin banyak masyarakat yang merasa dirinya miskin dan cenderung bertahan dalam kondisi demikian. Beberapa kelompok masyarakat justru merasa dalam posisi yang aman dalam kemiskinannya karena selalu mendapatkan bantuan untuk menopang kebutuhan hidupnya. Beberapa jenis bantuan yang disalurkan pemerintah juga cenderung dapat diakses oleh individu yang sama. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat tidak menjadikan bantuan tersebut sebagai instrumen yang dapat membuka peluang bagi dirinya untuk menciptakan tarap hidup yang lebih baik. Misalnya dengan membelanjakan kearah yang lebih produktif. Akan tetapi justru menciptakan iklim kehidupan yang dapat menjadikannya bertahan sebagai penerima bantuan tersebut. Maka melalui perilaku miskin yang dibangun individu atau kelompok bisa bertahan (*survive*) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan baru yang muncul dari fenomena diatas adalah datang dari kelompok yang tidak menerima bantuan tetapi merasa diri miskin dan layak juga mendapatkannya. Sehingga melahirkan kecemburuan sosial dan yang terjadi adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang adanya perlakuan istimewa kepada kelompok miskin. Dengan demikian masyarakat mempunyai asumsi bahwa kemiskinan bukan masalah tetapi peluang bagi dirinya untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dalam kondisi demikian, maka kemiskinan akan semakin sulit untuk diatasi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang "Perilaku Miskin Masyarakat Untuk Menghadapi Persaingan Ekonomi".

2. Hasil Penelitian

a. Kemiskinan Dan Perilaku Miskin Masyarakat

1) Kemiskinan

kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Panjaitan: 2002). Para ahli seringkali mendefinisikan kemiskinan dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat. Dengan menjadikan pekerjaan dan pendapatan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan data tentang kemiskinan. Pendapat ini tentu tidak dapat disalahkan, akan tetapi terlalu sederhana jika menyorot kemiskinan dengan melihat hanya dalam konteks ekonomi saja. Karena kemiskinan merupakan probabilitas dari kelompok miskin tersebut untuk meningkatkan tarap kehidupannya. Secara umum indikator kemiskinan menurut bank dunia adalah: (1) Terbatasnya kepemilikan tanah dan modal. (2) Terbatasnya akses sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan (3) Pembangunan yang dominan ke kota. (4) Kesempatan yang tidak merata dalam anggota masyarakat. (5) Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor ekonomi. (6) Produktifitas yang rendah. (8) Tata kelola pemerintah yang buruk. (9) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlebihan (Dalam Jurnal Maimun Shaleh: 2009) Masalah kemiskinan merupakan masalah yang menggglobal. Menurut Martin dan Schuman dalam (M.Annas: 2014) kemiskinan ditingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya adalah 80%. Ini artinya bahwa kekayaan dunia ini hanya dikuasai oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia yakni (80%) dapat digolongkan pada masyarakat yang relatif miskin.

Sedangkan di indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 15 Februari 2021 menunjukkan bahwa: Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang. Sehingga masalah kemiskinan masih menjadi masalah dalam pembangunan. Meskipun sering kali data masyarakat miskin yang dirilis oleh BPS sering kali menjadi bahan perdebatan oleh para akademisi dan politisi di Indonesia. Secara umum kemiskinan dibagi menjadi empat: yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,

kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan ketidak berdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah 1 dolar per hari. Oleh karena itu jika sekarang ini nilai tukar dolar dengan adalah 14.475, maka semua masyarakat yang mempunyai pendapatan dibawah angka tersebut tergolong dalam masyarakat miskin absolut.

Sedangkan kemiskinan relatif terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, artinya pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat sekitar. Mengenai kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. Dan kemiskinan kultural berkaitan dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga melahirkan kemiskinan. Oleh karena itu sekali lagi kemiskinan bukan semata mengacu pada permasalahan ekonomi saja tetapi lebih kepada faktor yang mempengaruhinya seperti: lemahnya aspek moral, sosial dan juga aspek budaya dalam menyikapi kebijakan pembangunan.

Aspek moral, sosial dan budaya tersebut kemudian melahirkan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam realisasi kebijakan pembangunan. Kemiskinan yang muncul akibat lemahnya beberapa aspek moral, sosial dan budaya justru lebih sulit diatasi dibandingkan dengan kemiskinan yang hanya dipicu oleh faktor ekonomi semata. Masyarakat yang mempunyai moral yang tidak baik tentu akan melahirkan perilaku sosial dan kebiasaan yang tidak baik. Termasuk kebiasaan bergantung pada orang lain, atau bergantung pada kebijakan pemerintah atau mengharap bantuan dari pihak lain. Persoalan demikianlah yang memicu individu atau kelompok melahirkan perilaku miskin dalam masyarakat.

2) Perilaku Miskin Pada Masyarakat

Perilaku miskin merupakan respon masyarakat dalam menghadapi gejala pembangunan dan persaingan ekonomi. Perilaku miskin juga menjadi fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat. Karena manusia sebagai individu dan

warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Sehingga selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu kebutuhan selalu berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Maka tidak heran jika dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera (Soetomo: 2018). Sementara dikondisi lain pesatnya pembangunan dan lajunya mobilitas masyarakat selalu melahirkan tantangan baru yang berimplikasi pada semakin ketatnya persaingan dunia kerja. Akibatnya adalah manusia dituntut untuk mempunyai skill dan kreatifitas yang bagus untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan pada masyarakat yang mempunyai skill dan etos kerja yang rendah tentu hanya akan menjadi penonton laju pertumnuhan dan persaingan ekonomi tersebut. Oleh karena itu munculah sebuah fenomena yang penulis katakan sebagai perilaku miskin dalam masyarakat.

Dalam paradigma definisi sosial, perilaku sosial diartikan sebagai sebuah tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya (Geprge Ritzer:2014). Jika mengamati fenomena perilaku miskin masyarakat dalam bingkai paradigma definisi sosial maka perilaku miskin ini tentu mempunyai arti dan makna bagi individu atau kelompok. Dalam teorinya Max Weber ada empat jenis perilaku sosial yaitu: (1) perilaku sosial instrumental. (2) berorientasi nilai. (3) tradisional) dan (4) Afektif. Dalam analisis perilaku sosial instrumental, perilaku miskin pada masyarakat tentu dipahami sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksudkan adalah perlindungan dan hak yang didapatkan sebagai masyarakat miskin. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini artinya bahwa disamping terdapat berbagai macam ketimpangan bahkan samapai kepada ketidakadilan dan diskriminasi pada masyarakat miskin. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dengan menyandang predikat sebagai masyarakat miskin juga mempunyai hak dan keistimewaan dalam mengakses pelayanan sosial dalam pembangunan. Misalnya di bidang pendidikan keistimewaan bagi masyarakat miskin adalah mendapat jaminan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada bidang kesehatan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. mendapatkan bantuan berupa rumah layak huni dan banyak lagi yang lainnya. beberapa keistimewaan inilah yang menjadikan beberapa

masyarakat merasa nyaman dalam posisi miskin. sehingga menjadi miskin adalah suatu hal yang sangat menarik bagi masyarakat tertentu.

Menurut Homans perilaku sosial merupakan pertukaran aktifitas, ternilai ataupun tidak atau kurang lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang berinteraksi. Dalam artian bahwa teori pertukaran ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku sosial berdasarkan pada imbalan dan biaya (Ritzer: 2012). Dengan demikian perilaku miskin masyarakat merupakan upaya individu atau kelompok untuk mempertukarkan atau menawarkan diri sebagai masyarakat yang tergolong dalam kelompok yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin. imbalannya adalah dapat mengakses semua hak yang dapat diperoleh sebagai orang miskin.

b. Faktor Penyebab Munculnya Perilaku Miskin Pada Masyarakat

1) Struktural

Dalam menyalurkan bantuan, pemerintah memerlukan penjabaran yang jelas dalam mengkategorikan masyarakat miskin. Pendekatan dalam menentukan kriteria dan indikator kemiskinan juga sangat berpotensi melahirkan perilaku miskin dalam masyarakat. Indikator dalam mengukur kemiskinan yang keliru dapat berimplikasi pada sasaran pembangunan yang tidak tepat. Alhasil perilaku miskin akan muncul sebagai reaksi untuk dapat dilihat sebagai salah satu yang dapat tergolong dalam indikator kemiskinan tersebut. Dengan tujuan untuk memperoleh hak sebagai masyarakat miskin. Indikator yang digunakan selama ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika dipetakan, pendekatan berbasis hak pada dasarnya meliputi tiga tahap dalam pengukurannya (Bentley Dalam Edi Suharto:2013). Pada setiap tahap memiliki implikasi bagi perumusan desain sistem pengukuran kemiskinan:

- a) Analisis status atau kondisi kehidupan orang miskin yang diukur melalui kajian ilmiah mengenai seperangkat standart-standart minimum atau yang berkaitan dengan model sebab akibat yang telah terbukti atau opini responden yang bersangkutan. Artinya dalam mengukur status atau kondisi kehidupan manusia berdasarkan pada kerangka yang berbasis hak memerlukan pengukuran fenomena yang kongkrit dan dapat diobservasi untuk mengidentifikasi apakah standart minimum dapat dipenuhi.
- b) Identifikasi pemangku kewajiban: apa yang harus dipenuhi negara dan pemangku kewajiban lainnya. Hakekat kewajiban negara terhadap warganya perlu dijelaskan.

- c) Sfesifikasi hak-hak orang miskin dan penyediaan pelayanan untuk memenuhi hak tersebut.

Berdasarkan pada tiga tahap diatas, dalam menentukan indikasi miskin memerlukan sebuah observasi yang mendalam. Tidak berhenti sampai pada hasil observasi tersebut tetapi memerlukan sebuah identifikasi yang tepat. Sehingga dapat menghasilkan sfesifikasi yang tepat mengenai indikator dan hak-hak masyarakat miskin.

2) Kultural

Perilaku miskin juga berkembang sebagai fenomena budaya dalam masyarakat sekitar. Kebudayaan atau kebiasaan turun temurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dijadikan sebagai pegangan dan kebiasaan hidup masyarakat. Termasuk budaya miskin, Budaya kemiskinan mencakup apa yang diyakini (nilai-nilai), respons dalam tindakan (sikap), dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan (pola-pola kelakuan) yang berlangsung terus-menerus. Lewis mengidentifikasi budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistik berciri kapitalistik, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berstrata rendah dan mengalami perubahan sosial yang drastis. Perilaku yang mencirikan budaya kemiskinan ini dijalankan secara turun-temurun antar generasi, sehingga menghambat suatu kelompok dalam masyarakat tertentu untuk keluar dari garis kemiskinan (Lewis dalam Jurnal Johan Arifin:2020). Misalnya kalau di desa adalah kebiasaan menunggu musim hujan untuk mendapatkan upah sebagai buruh tani tanpa adanya usaha untuk mencoba pekerjaan baru, budaya yang menyatakan bahwa lebih baik hidup sederhana yang penting bisa kumpul bersama keluarga. Contoh diatas disadari atau tidak sebenarnya menjadi akar masalah dari sulitnya pengentasan kemiskinan.

3) Sosial

Umumnya setiap masyarakat menginginkan kondisi kehidupannya berkembang semakin baik. Suatu kehidupan dimana kebutuhan-kebutuhan dapat semakin terpenuhi. Sehingga ada rasa aman karena tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran tentang hari esok. Setiap masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang memberikan iklim kondusif guna aktualisasi diri dan mempunyai relasi sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian dalam kehidupan

bermasyarakat di desa khususnya apabila kehidupan saat sekarang ini masih belum memenuhi kondisi ideal, maka selalu ada dorongan positif dari lingkungannya untuk bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Misalnya dengan memberikan keringanan dalam setiap urunan bagi masyarakat miskin. Tentu hal yang seperti ini adalah langkah yang positif dalam rangka membantu sesama. Akan tetapi tidak sedikit juga toleransi semacam ini seringkali melahirkan kecemburuan sosial pada masyarakat yang tidak mendapatkannya. Sehingga perilaku miskin lahir untuk menarik empati dari lingkungan sekitar.

C. Konsep Pembangunan Sikap Dan Mental Masyarakat

Perilaku masyarakat biasanya muncul dari pengaruh yang dihasilkan oleh lingkungan. Dalam arti bahwa perilaku sosial masyarakat dapat dibentuk oleh lingkungan sosialnya sendiri, hukum atau norma yang mengatur relasi sosialnya, baik itu hukum pemerintah ataupun hukum adat atau budaya setempat. Dalam paradigma fakta sosial yang lahir dan besar dari karya Emile Durkheim menyatakan bahwa sikap dan perilaku individu dibentuk oleh norma sosial atau hukum adat dan hukum pemerintah yang dalam hal ini disebut sebagai fakta sosial dalam bentuk Material. Kemudian paradigma ini melahirkan dua teori besar yang disebut dengan teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Jika kita mengamati fenomena kemiskinan dalam konsep teori konflik sosial maka sebenarnya masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Artinya kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah. Sehingga masyarakat miskin cenderung dianggap sebagai pihak yang dikuasai dan dapat dimanfaatkan kelemahannya. Sedangkan dalam pandangan strukturalisme fungsional, sebenarnya masyarakat itu selalu dalam posisi yang *equilibrium* atau seimbang. Karena seluruh struktur sosial dan sistem sosial fungsional terhadap yang lain (Ritzer: 2014). Sehingga dalam kondisi ini masyarakat miskin itu memberikan fungsi bagi masyarakat yang lain atau terhadap sistem yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kemiskinan itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam menjalankan roda kehidupan. Oleh karena itu jika kita mengamati dalam konteks kehidupan masyarakat desa, pemilik tanah merasa sangat terbantu dengan adanya masyarakat miskin karena dapat memanfaatkan tenaganya dengan harga yang murah untuk membantu merawat tanamannya. Dalam kondisi ini masyarakat miskin cenderung bertahan dan merasa ketergantungan dengan pekerjaan yang ada. Merasa enggan

mencoba usaha lain yang lebih menjanjikan bahkan pada saat sedang tidak ada peluang kerja. maka untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik adalah harus dilakukan dengan merubah sikap dan mental masyarakat.

Pembangunan sikap dan mental yang dimaksudkan di sini adalah menanamkan budaya berfikir yang berorientasi terhadap masa depan. Masyarakat diberikan pemahaman tentang keharusan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Selanjutnya membangun hasrat masyarakat untuk mau berinovasi dan bereksplorasi dalam dunia kerja. Sehingga tidak tergantung pada satu sumber pendapatan saja. Serta menanamkan rasa percaya diri bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk dapat menghasilkan karya yang lebih baik dan berharga. Merubah pandangan masyarakat untuk tidak tergantung pada satu sumber penghasilan. Serta tidak menjadikan bantuan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang selalu diharapkan. Dalam kehidupan masyarakat desa yang cenderung homogen dalam bidang pekerjaan juga seringkali merasa sulit beradaptasi dengan pekerjaan baru. Misalnya masyarakat desa yang identik dengan pekerjaan sebagai petani atau buruh tani merasa sangat sulit menyesuaikan diri dengan bidang usaha yang lain misalnya berwirausaha. Sehingga tidak jarang program pemerintah yang memberikan modal usaha tidak sejalan dengan yang diharapkan. Oleh karena itu sebelum melakukan pembangunan fisik dengan membangun usaha rakyat, sangat penting adanya pendampingan masyarakat untuk mengubah pola pikir yang demikian.

3. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan terobosan-terobosan yang diimplementasikan dalam berbagai program dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan sesederhana yang dibayangkan. Permasalahan kemiskinan tidak semata-mata tentang kelemahan di bidang ekonomi melainkan merupakan permasalahan yang kompleks dan menyangkut aspek lain seperti, lemahnya moral, kurangnya skill untuk berinovasi dan mengeksplorasi hal baru, serta pandangan dan rasa ketergantungan pada pihak lain. Sehingga melahirkan budaya baru dalam

masyarakat yang penulis sebut sebagai perilaku miskin. perilaku miskin muncul sebagai upaya untuk mempertukarkan keadaannya dengan imbalan berupa bantuan pemerintah, empati masyarakat serta dalam mengakses kemudahan-kemudahan lainnya.

Beberapa faktor yang melahirkan perilaku miskin diantaranya adalah (1) struktural atau kebijakan pemerintah dalam menentukan indikator miskin serta program bantuan yang disalurkan secara tunai mengakibatkan masyarakat menjadi tergantung dan selalu berharap untuk mendapatkannya. (2) kultural, budaya masyarakat yang merasa nyaman dengan kondisi miskin juga menjadi salah satu faktor yang melahirkan perilaku miskin. (3) sosial, relasi sosial juga sering kali memberikan toleransi dan keringanan terhadap masyarakat yang dipandang miskin.

Sehingga dalam upaya mengurangi atau mengentas angka kemiskinan. Pemerintah bukan hanya merujuk pada pembangunan yang bersifat fisik tetapi juga harus mempertimbangkan pembangunan sikap dan mentalitas bagi masyarakat. Karena dengan mengubah pemahaman serta sikap dan mentalitas pada masyarakat maka akan melahirkan semangat baru, cara pandang yang baru dan mental yang baru di tengah kehidupan.

Referensi

- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- M. Annas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Panjaitan, Merphin. 2002. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

Lewis Dalam Jurnal Johan Arifin. 2020. Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia. Artikel Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Sholeh, Maimun, 2009, "Kemiskinan: Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya, Artikel Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi", Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Lain-Lain

BPS: Profil Kemiskinan Di Indonesia. September 2020 yang dirilis 15 februari 2021.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT BAURAN: ANALISIS PADA INTERAKSI KELOMPOK ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT LOKAL

Riska Mutiah^{1*}

¹ UIN Mataram; riskamutiah@uinmataram.ac.id

* Correspondence

Received: 21/07/2021; Accepted: 03/08/2021; Published: 04/08/2021

Abstrak: Interaksi antar etnis yang berbeda dalam suatu lingkup sosial akan berhubungan dengan isu integrasi. Terlebih masyarakat Indonesia adalah majemuk dengan identitas budaya masing-masing yang telah melekat. Identitas etnis tidak lepas dari apa yang disebut dengan stereotip yang seringkali menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan menentukan interaksi yang terjadi terlepas benar atau tidaknya prasangka tersebut. Pola interaksi antara etnis Tionghoa dengan beberapa etnis lokal di Indonesia telah diteliti oleh berbagai pihak antara lain Revida di Medan, Hasbullah di Bengkalis dan Muzakky di Yogyakarta. Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal hanya terjadi dalam ranah ekonomi saja. Mereka tidak melebur dalam proses asimilasi. Penulis hendak mengkaji mengapa pola interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di atas tidak mencapai titik asimilasi dengan menggunakan studi pustaka sebagai metodologinya. Hasil analisis menunjukkan relasi antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal tidak berada pada jarak dekat melainkan berada pada jarak publik, padahal mereka telah hidup berdampingan cukup lama. Hal ini disebabkan karena pola relasi mereka terfragmentasi atau di antara mereka tercipta solidaritas organik. Karena alasan tersebut maka interaksi mereka tidak memungkinkan terjadinya pertukaran, pembauran kebudayaan atau nilai satu sama lain diantara keduanya

Abstract: *The interaction between different ethnic groups in a social sphere will always be related to integration issue. Moreover, the Indonesian people are diverse with their own inherent cultural identities. Ethnic identity cannot be separated from so-called stereotypes, which are often the main reference to identify and/or determine interactions that occur regardless of the validity of the prejudices referred to. The pattern of interaction between the Chinese and several local ethnic groups in Indonesia has been investigated by various parties, including Revida in Medan, Hasbullah in Bengkalis and Muzakky in Yogyakarta. The results of the three studies show that the interaction between the Chinese and local communities only occurs in the economic realm. It causes the inability to merge in the assimilation process. The author wants to examine why the pattern of interaction between ethnic Chinese and local communities mentioned above does not reach the point of assimilation by using literature study as a methodology. The results of the analysis shows that the relationship between the Chinese ethnic group and the local community is not in close proximity but more at public distance, even though they have lived side by side for quite a long time. Such a distance happened because the relationship patterns between these groups is fragmented then induce the emergence of organic solidarity between them. For this reason, the interaction between these groups do not allow for exchange, intermingling of cultures or values.*

Kata Kunci: Asimilasi, Etnis Tionghoa, Interaksi, Masyarakat Lokal, Pola Relasi

1. Pendahuluan

Diversitas etnis dalam masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan. Beragam corak nilai dan cara hidup yang berbeda mewarnai kehidupan sosial masyarakat sehingga interaksi antar etnis adalah hal yang tidak dapat dihindari. Pertemuan etnis berbeda yang sama-sama berdiam di dalam suatu wilayah bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah timbulnya hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru namun akan menimbulkan dampak negatif jika pertemuan suku-suku bangsa tersebut tidak menimbulkan hubungan sosial yang baik karena adanya perbedaan sikap dalam memandang objek yang menjadi kepentingan Bersama (Warsito: 1984).

Interaksi dari etnis yang berbeda dalam suatu lingkup sosial akan berhubungan dengan proses integrasi atau disintegrasi. Terlebih masyarakat Indonesia adalah majemuk yang terdiri dari ratusan etnis dengan identitas budaya masing-masing yang telah melekat. Berbicara mengenai identitas etnis seringkali tidak lepas dari apa yang disebut dengan stereotip atau prasangka kelompok etnis lain atas suatu etnis tertentu. Stereotip inilah yang seringkali menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan menentukan interaksi yang terjadi terlepas benar atau tidaknya prasangka tersebut.

Salah satu pola interaksi antar etnis yang menarik untuk dianalisis adalah interaksi sosial antara etnis Tionghoa yang asal usulnya berasal dari Cina Daratan dengan masyarakat lokal setempat yang seringkali disebut 'pribumi'¹ sebagai pembeda diantara keduanya yang menyiratkan kesan sebagai masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Pola interaksi antara etnis Tionghoa dengan beberapa etnis lokal di Indonesia telah diteliti oleh berbagai pihak antara lain Erika Revida pada 2006 di Kota Medan Sumatera Utara, Hasbullah di Kabupaten Bengkalis Riau pada 2013 dan Farid Muzakky pada 2016 di Kota Yogyakarta. Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di Medan, Bengkalis serta Yogyakarta hanya terjadi dalam ranah ekonomi saja. Mereka tidak melebur dalam proses asimilasi. Dalam hal ini penulis hendak mengkaji mengapa pola

¹ Istilah pribumi dan non pribumi dilarang penggunaannya yang diatur dalam UU No 40 tahun 2008 dan Inpres No 26 tahun 1998.

interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di atas tidak mencapai titik asimilasi.

Artikel ini menggunakan studi pustaka sebagai metodologinya. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang mengumpulkan, membaca, mencatat serta mengolah data pustaka sebagai bahan penelitian (Zed, 2004:3). Beberapa sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal ilmiah yang merupakan laporan penelitian, buku-buku teks, serta kamus daring yang mencakup data yang dikaji. Setelah mengumpulkan beberapa sumber pustaka yang diperlukan maka penulis melakukan pencatatan bibliografi. Adapun terkait laporan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai interaksi kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal juga dikumpulkan oleh penulis. Penulis menggunakan 3 laporan penelitian dengan tema yang sama dan dilakukan diberbagai daerah yang berbeda yakni di Medan, Bengkalis serta Yogyakarta. Selanjutnya, penulis membuat ringkasan hasil penelitian berupa nama peneliti, tahun pelaksanaan, metodologi serta hasil penelitian yang selanjutnya menjadi bahan analisis dalam artikel ini.

Adapun analisis dalam artikel ini menggunakan solidaritas sosial milik Emile Durkheim. Meskipun tidak membahas mengenai persoalan etnis secara langsung, namun teori ini relevan digunakan dalam artikel ini mengingat kelompok-kelompok etnis yang dianalisis merupakan bagian dari masyarakat modern. *The Division of Labour* pada 1893 merupakan karya Durkheim yang mengkaji apa yang membuat masyarakat modern dan masyarakat tradisional terintegrasi.

Durkheim mengemukakan bahwa solidaritas merupakan suatu kondisi hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat dengan pengalaman emosional bersama (Syukur, 2018:58). Bahwa masyarakat primitif disatukan oleh kesadaran kolektif atau hubungan kekeluargaan yang kuat disebut solidaritas organik. Sedangkan pada masyarakat modern, hubungan yang ada diatur oleh pembagian kerja, manusia terikat satu sama lain karena adanya saling ketergantungan yang disebut dengan solidaritas mekanik. Berikut adalah perbedaannya mengutip Johnson dalam Syukur (2018: 59):

Tabel 1. Perbandingan solidaritas mekanik dan solidaritas organik

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
1. Pembagian kerja rendah	1. Pembagian kerja tinggi
2. Kesadaran kolektif kuat	2. Kesadaran kolektif lemah
3. Hukum represif dominan	3. Hukum restitutif dominan
4. Individualitas rendah	4. Individualitas tinggi
5. Konsensus terhadap pola normatif penting	5. Konsensus terhadap nilai abstrak dan umum itu penting
6. Peran komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang	6. Badan kontrol sosial yang menghukum
7. Saling ketergantungan itu rendah	7. Saling ketergantungan yang tinggi
8. Bersifat pedesaan	8. Bersifat industrial-perkotaan
9. Diikat kesadaran kolektif	9. Diikat sistem pembagian kerja

Pembagian kerja dalam masyarakat modern melahirkan solidaritas organik. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peran sosial memunculkan adanya saling ketergantungan karena ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam masyarakat mekanis, hukum bersifat represif. Pelaku kejahatan akan dikenakan hukuman sebagai balasan atas kesadaran kolektif yang dilanggar. Hukum ditegakkan untuk mempertahankan keutuhan kesadaran kolektivitas masyarakat, masyarakat percaya pada moralitas Bersama sehingga gangguan yang adakemungkinan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat (Syukur, 2018:60).

Banyaknya peran dalam masyarakat membuat masyarakat modern menjadi orang individualistik dengan masalah yang ada di masyarakat menjadi sangat kompleks. Penyimpangan dilihat sebagai tindakan yang melawan individu tertentu atau pada segmen masyarakat tertentu, bukan melawan system moral yang ada. Hukum tidak muncul dari reaksi emosional masyarakat. Durkheim mengemukakan bahwa kuatnya solidaritas organik ditandai dengan pentingnya hukum yang bersifat memulihkan daripada yang bersifat represif (Syukur, 2018:59).

2. Pembahasan

Migrasi masyarakat tentunya menyebabkan bertemunya dua atau lebih kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Asimilasi bisa dikatakan sebagai jembatan utama agar dua kelompok etnis atau lebih bisa terintegral dan menumbuhkan rasa persatuan yang tinggi. Namun dalam prosesnya, saling berterimanya kedua suku kelompok etnis atau lebih tersebut ternyata tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang tergambar dari 3 penelitian yang berbeda mengenai pola interaksi kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di Medan, Bengkalis serta Yogyakarta.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Revida (2006), ditemukan bahwa Medan merupakan salah satu kota yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa namun dalam interaksinya dengan masyarakat lokal masih mengalami hambatan sosiologis dan psikologis. Meskipun etnis Tionghoa merupakan kelompok yang perannya menonjol dalam sektor ekonomi, namun mereka mengalami benturan dalam membangun relasi sosial dengan masyarakat lokal akibat adanya stereotip yang melekat. Stereotip ini timbul karena adanya anjuran bagi masyarakat lokal untuk mengecek harga asli barang ditempat lain terlebih dahulu sebelum berbelanja dengan pedagang etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan kadangkala pedagang dari etnis Tionghoa menawarkan dagangannya dengan harga tinggi kepada masyarakat lokal.

Adapun hasil penelitian Hasbullah (2013) di Bengkalis menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berlangsung antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal terjadi di sektor ekonomi karena adanya saling memerlukan dan saling untung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Interaksi yang terjadi ini tidaklah mulus karena posisi etnis Tionghoa yang menguasai pasar, sektor transportasi hingga nelayan di Bengkalis. Relasi yang terjalin antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal adalah relasi pedagang dan pembeli maupun relasi majikan dan buruh. Kelompok etnis Tionghoa berpegang pada pandangan materialistik bahwa semua hal bisa diatur dengan uang dan buruh yang notabene adalah masyarakat lokal seringkali tidak diperlakukan dengan baik. Selain itu, lokasi pemukiman kelompok etnis Tionghoa yang terlokalisasi menyebabkan sulit adanya interaksi dan bauran.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakky (2016) di Yogyakarta menggunakan metode *field study* dengan teknik dokumentasi, wawancara serta obsevasi. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal hanya terjadi pada sektor ekonomi saja. Relasi yang terbangun adalah relasi pedagang dan pelanggan atau relasi *partnership* dalam menjalankan usaha. Hal ini terjadi karena adanya faktor saling membutuhkan di antara keduanya. Namun seringkali terdapat konflik yang dipicu oleh kecemburuan sosial dari kedua kelompok tersebut sehingga sampai saat ini keduanya hidup berdampingan namun terdapat sekat yang menghalangi.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup utamanya pada sektor ekonomi, kedua kelompok masyarakat ini saling bergantung sehingga tercapai komunikasi simbiotik (Barth, 1988:106). Komunikasi ini memungkinkan kedua kelompok, baik kelompok etnis Tionghoa maupun masyarakat lokal saling memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain, mengingat peran mereka sebagai pedagang dan pembeli.

Antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal, tidak terjadi proses pertukaran nilai-nilai yang signifikan dalam bidang penting lainnya yang menopang kehidupan sosial. Penelitian Muzakky (2016) menunjukkan bahwa kelompok etnis Tionghoa di Yogyakarta telah menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Namun lain halnya dengan masyarakat lokal yang berjumlah besar, mereka tidak terpengaruh oleh nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh warga etnis Tionghoa meskipun mereka hidup berdampingan.

Kehidupan sosial masyarakat bauran/multietnis yang baik ditandai dengan adanya proses-proses sosial terutama proses interaksi sosial dan proses asimilasi yang baik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan sosial yang baik dalam Sukmana (2005) yaitu:

1. Adanya kedekatan antara tokoh masyarakat dari kedua etnis;
2. Adanya kesamaan agama;
3. Adanya perkawinan campur antaretnis;
4. Adanya kekompakan dan gotong-royong;
5. Kesadaran etnis pendatang untuk mengikuti aturan setempat;
6. Adanya unsur rasa persaudaraan antarwarga;
7. Rasa saling menghormati dan menghargai.

Dilihat dari faktor-faktor di atas, masyarakat bauran antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal dalam proses sosialnya tidak memiliki beberapa faktor di atas, seperti sangat jarang terjadi perkawinan antaretnis

antara warga transmigran dengan warga lokal. Selain itu terdapat perbedaan agama serta budaya yang mencolok antara komunitas etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal. Terutama bila kita melirik fakta bahwa Konghuchu sebagai agama yang dianut oleh Sebagian besar etnis Tionghoa baru diresmikan sebagai salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.

Pola relasi yang berkembang antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal tidak berada pada jarak dekat. Pola relasi mereka berada pada jarak publik, meskipun mereka telah hidup berdampingan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut tidak memungkinkan adanya pertukaran, pembauran kebudayaan atau nilai satu sama lain diantara warga Tionghoa dan masyarakat lokal. Ini tidak menunjukkan proses integrasi di antara keduanya yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu pertama, interaksi yang terjadi diantara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal berada pada ruang publik yakni tempat perbelanjaan saja. Sebagian besar kelompok etnis Tionghoa bergelut di sektor ekonomi, bekerja sebagai pengusaha, pedagang di pasar-pasar, membuka kedai makan, bengkel, dan lain sebagainya. Interaksi sosial keduanya tidaklah berlangsung lama, meskipun kejadian tersebut berulang. Kedua, meskipun interaksi tersebut terjadi berulang-ulang setiap hari keduanya tidak bertempat tinggal di lingkungan yang sama, interaksi dan kedekatan hanya sebatas pelanggan dan penjual.

Selain karena latar belakang etnik yang berbeda antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal, pola relasi yang demikian bentuknya bisa terjadi akibat latar historis antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal. Hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah yang mana pada masa kolonial pemerintah yang berkuasa melakukan klasifikasi sosial ke dalam 3 lapisan. Klasifikasi tersebut mengatur bahwa orang Belanda sebagai kelas atas, masyarakat yang berasal dari Timur Asia (kelompok Tionghoa) sebagai kelas menengah dan pribumi sebagai kelas bawah. Klasifikasi ini berdampak pada akses sumberdaya, keamanan dan lainnya yang diterima masing-masing kelas dan pada level tertentu masih terbawa hingga zaman kemerdekaan bahkan sampai sekarang. Sentimen inilah yang menyebabkan adanya stereotip etnis atau persepsi masing-masing golongan tersebut satu sama lain akan menentukan relasi fungsional antar mereka (Warnaen, 2002). Akibatnya, minim usaha untuk saling mengenal antara satu sama lain baik dari segi latarbelakang etnis, sistem nilai, kebiasaan, dan lain sebagainya mengakibatkan mereka memiliki persepsi masing-masing

yang landasannya bisa faktual atau tidak akhirnya memunculkan pola relasi yang sedemikian rupa. Relasi-relasi mereka akhirnya sebatas jarak publik.

Dalam perpektif Durkheim, pola-pola relasi masyarakat yang hidup dengan pola solidaritas mekanis bertransformasi menuju struktur sosial kehidupan modern yang kokoh membentuk solidaritas organis (Ritzer, 2013:63). Dalam kehidupan masyarakat bauran pola relasinya berbentuk fragmentasi organis dalam hal ini antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal. Solidaritas organis ditandai dengan diferensiasi struktural pembagian kerja (Durkheim, 1989). Pola relasi keduanya lebih cenderung hubungan antara pedagang dan pelanggan serta hubungan antara majikan dengan buruh, artinya hubungan kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal adalah hubungan yang terbentuk atas dasar pembagian kerja saja. Hal inilah yang menyebabkan kesadaran kolektif antara mereka yang lemah.

3. Kesimpulan

Pola relasi antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal tidak berada pada jarak dekat melainkan berada pada jarak publik, padahal mereka telah hidup berdampingan cukup lama. Pola relasi mereka terfragmentasi atau diantara mereka tercipta solidaritas organik yang pola hubungan mereka atas dasar pembagian kerja. Hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya asimilasi di antara mereka dikarenakan pola relasi mereka yang berbentuk organis. Pola relasi tersebut menyebabkan interaksi antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal berada dalam jarak publik sehingga interaksi mereka tidak memungkinkan terjadinya pertukaran, pembauran kebudayaan atau nilai satu sama lain diantara keduanya.

Referensi

- Barth, Fredrik. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI-Press.
- Durkheim, Emile. (1989). *Sosiologi dan Filsafat*. Jakarta: Erlangga.
- Hasbullah. (2013). Pola Hubungan Etnik Cina dengan Masyarakat Pribumi di Bengkalis. *Jurnal Toleransi*, 5 (1).
<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/68/58>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Muzakky Farid. (2016). Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi di Kota Yogyakarta. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22012/1/10540044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Ritzer, George. (2013). *The Wiley-Blackwell Companion To Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Revida Erika. (2006). Interaksi sosial Masyarakat Etnis Cina dengan Pribumi di Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal Harmoni sosial* 1(1).
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15293/har-sep2006-%20%284%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Sukmana, Oman. (2005). *Model Interaksi Sosial dalam Masyarakat Bauran Etnis Arab-Jawa*. Publica Jurnal Vol. II.

Syukur, Muhammad. (2018). *Dasar-dasar Teori Sosiologi*. Depok: Rajawali Pers.

Warnaen, Suwarsih. (2002). *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*. Jakarta: Mata Bangsa.

Warsito, R. (1984). Transmigrasi dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman. Jakarta: Rajawali.

Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Peran Komunitas Sosial Keagamaan dalam Meningkatkan Religiusitas Remaja: Studi pada IPNU-IPPNU Ranting Capgawen Selatan, Kabupaten Pekalongan

M. Riziq¹, Abdul Mukhlis^{2*} and Heru Susanto³

¹ IAIN Pekalongan 1; rizigmuhammad42@gmail.com

² IAIN Pekalongan 2; abdul.mukhlis@iainpekalongan.ac.id

³ STKIP Singkawang 3; anto.eru84@gmail.com

* Correspondence: abdul.mukhlis@iainpekalongan.ac.id

Received: 02/08/2021; Accepted: 06/08/2021; Published: 10/08/2021

Abstrak: IPNU-IPPNU merupakan organisasi pelajar bentukan ormas Nahdhatul Ulama. Anggotanya terdiri atas personal usia pelajar atau remaja. IPNU-IPPNU sebagai suatu organisasi di bawah naungan NU telah mengalami dinamika yang panjang. Organisasi tersebut berdiri di hampir setiap daerah yang didominasi ormas NU, seperti di daerah Capgawen Selatan (Capsel), Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Organisasi ini memiliki tantangan besar dalam menghadapi disrupsi dan dekadensi moral di kalangan remaja. Berdasarkan itu, tujuan studi ini adalah memberi gambaran atas upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi IPNU-IPPNU sebagai organisasi sosial keagamaan dalam meningkatkan religiusitas remaja di era disrupsi dan dekadensi moral. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penyediaan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Adapun data sekunder menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan IPNU-IPPNU Capgawen Selatan memiliki peran yang cukup signifikan bagi peningkatan karakter religiusitas pada diri remaja. Melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, IPNU-IPPNU telah menyisipkan misi untuk membiasakan remaja dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Abstract: IPNU-IPPNU is a student organization formed by the Nahdhatul Ulama organization. Its members consist of students or teenagers. IPNU-IPPNU as an organization under the auspices of NU has experienced a long dynamic. The organization is established in almost every area dominated by NU mass organizations, such as in the South Capgawen (Capsel) area, Kedungwuni District, Pekalongan Regency. This organization has great challenges in dealing with disruption and moral decadence among youth. Based on that, the purpose of this study is to provide an overview of the efforts made by the IPNU-IPPNU organizations as religious social organizations in increasing youth religiosity in the era of disruption and moral decadence. The research method used is descriptive qualitative. The provision of primary data is done by using interview and observation techniques. The secondary data uses literature study. The results showed that IPNU-IPPNU South Capgawen activities had a significant role in increasing the character of religiosity in adolescents. Through the activities held, IPNU-IPPNU has inserted a mission to familiarize youth with socio-religious activities.

Kata Kunci: IPNU-IPPNU, Peran Komunitas, Religiusitas, Sosial Keagamaan.

1. Pendahuluan

Masa remaja adalah fase yang dianggap penting dalam perkembangan manusia. Masa ini tidak bisa dianggap remeh dan dilewatkan begitu saja dengan tidak mengisinya dengan hal-hal positif, produktif, dan kreatif guna mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan selanjutnya. Artinya, dengan sependek pemahaman tersebut kita dapat memahami bahwa masa remaja adalah fase pembentukan karakter. Selain pembentuk karakter, pada masa remaja juga terdapat perubahan-perubahan signifikan semacam mental, sosial, dan tentunya fisik (Gunarsa, 2011: 25).

Pada abad ke-21 ini, perkembangan era informatika dan arus globalisasi semakin tak terbendung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang massif tersebut selain memberi dampak positif, juga turut meninggalkan jejak-jejak negatif (Taopan dkk., 2019: 62). Dampak negatif inilah yang biasanya banyak menyasar kepada remaja sebagai pengguna teknologi dan informasi yang sedang berkembang. Dampak negatif ini pula yang menjadi problem yang tidak lagi bisa dianggap remeh dalam fase perkembangan karakter remaja.

Di tengah peran remaja yang digadang-gadang sebagai penerus bangsa, kehidupan remaja justru diwarnai beraneka ragam penyimpangan sosial akibat penggunaan teknologi informasi secara tidak arif dan bijak. Berbagai penyimpangan sosial tersebut juga didukung oleh masa remaja itu sendiri yang sedang berada pada masa rasa ingin tahunya sangat kuat dan tinggi. Maka demikian, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada remaja sangat diperlukan upaya pencegahan dan penyeimbangan dari berbagai pihak.

Capgawen Selatan adalah salah satu daerah yang secara administrative masuk dalam kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Seperti jamak diketahui, masyarakat Desa Capgawen Selatan mayoritas beragama Islam dan terbilang sangat religius. Hal ini terbukti dengan banyaknya majelis-majelis pengajian atau kajian ilmu agama yang diselenggarakan di musala, mejelis ta'lim atau madrasah. Di tengah-tengah kampung tersebut juga berdiri dua musala yang setiap harinya dilaksanakan sholat jamaah lima waktu. Selain untuk sholat berjamaah, musala dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan kegiatan keagamaan lainnya. Fenomena demikian ini merupakan manifestasi dari catur pusat pendidikan Islam yang menempatkan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Masyarakat Capgawen Selatan adalah orang-orang yang menganut ajaran *al-ahlal as-sunnah wa al-jamaah* dengan payung organisasinya yaitu Nahdhatul Ulama (NU). Dengan demikian, akan dapat kita temukan organisasi-organisasi yang dinaungi oleh NU seperti Fatayat, Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), hingga Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU). Selain adanya organisasi-organisasi tersebut, di lingkungan kampung juga dipraktikkan ritus-ritus keagamaan khas warga NU seperti pembacaan surat yasin dan tahlil untuk orang yang sudah meninggal, ziarah kubur, pembacaan manaqib, shalawat nariyah, hingga pembacaan barzanji yang dilakukan secara rutin.

Di tengah-tengah era globalisasi dan era kemajuan informatika seperti saat ini, lingkungan yang religius belum tentu menjamin masyarakatnya memiliki sisi religiusitas secara otomatis. Masyarakat tetap membutuhkan peran komunitas sebagai peletak dasar sosiologis maupun ideologis. IPNU dan IPPNU Ranting Capgawen Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat Capgawen Selatan sebagai organisasi yang menysasar remaja sebagai anggotanya. Kiprah organisasi ini diharapkan mampu membendung dan mencegah penyimpangan sosial dari remaja dengan mengarahkannya untuk berproses dan belajar dalam organisasi. Hal ini dinilai akan memberikan dampak positif yang berujung pada pembentukan karakter religius pada remaja. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait Peran organisasi IPNU dan IPPNU untuk membentuk karakter religius remaja Capgawen Selatan.

Riset-riset yang mengetengahkan upaya pembentukan maupun penanaman karakter religius memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun, peneliti melihat peluang lain yang masih terbuka, yakni pembentukan karakter yang dilakukan oleh komunitas. Peran komunitas inilah yang tidak muncul pada riset-riset seperti yang dilakukan oleh Wardati (2019). Dalam risetnya, Wardati mengkaji secara spesifik peran guru dalam pembentukan karakter sosial anak. Adapula riset Affandy (2019) mengenai penanaman *local wisdom* dalam membentuk perilaku keberagamaan siswa. Lalu, penelitian oleh Suradi (2018) yang mengangkat topik penanaman religiusitas keislaman di lingkup sekolah. Ketiga riset terdahulu tersebut jelas memiliki perbedaan dengan riset ini meski objek yang dikaji identik, yakni penanaman atau pembentukan karakter. Distingsi yang paling tampak adalah dari fokus kajian. Penelitian-penelitian sebelumnya, berfokus pada karakter di lingkup sekolah yang dilakukan oleh para guru.

Sementara pada riset ini, peran komunitas menjadi fokus utama dalam pembentukan karakter religius pada diri remaja.

Berpatok pada argumentasi-argumentasi di muka, dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus kajiannya adalah ihwal peran organisasi IPNU dan IPPNU Ranting Capgawen Selatan dalam meningkatkan karakter religius remaja Capgawen Selatan. Penelitian dilakukan dengan mencari data melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Selain menggunakan wawancara sebagai sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen dan lain-lain. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

2. Hasil Penelitian

Pembahasan yang dikemukakan pada bagian ini memuat hasil pembacaan peneliti atas fenomena atau peristiwa yang diamati, antara lain selang pandang organisasi IPNU-IPPNU, sebatas ihwal IPNU-IPPNU Ranting Capgawen Selatan, karakter religius dan masa remaja, dan peran IPNU-IPPNU Capgawen Selatan dalam meningkatkan karakter religius remaja.

2.1. Selang Pandang Organisasi IPNU-IPPNU

Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) merupakan organisasi yang menyasar kalangan pelajar sebagai upaya pengkaderan, penanaman nilai kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang merupakan representasi gerakan Nahdhatul Ulama (NU) di bidang pendidikan dan kaum pelajar agar terbentuk kader-kader NU yang siap meneruskan dan melaksanakan semangat akidah Ahlussunah Wal Jamaah juga memperkuat ukhuwah Nahdhiyah (Kamilun, 2011: 31). Dengan kata lain, organisasi ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan di bawah naungan NU yang bergerak di kalangan pelajar sebagai anggotanya.

IPNU didirikan pada 24 Februari 1954 sewaktu kongres LP. Ma'arif yang digelar di Semarang. Pendirinya adalah Prof. Dr. KH. Tolchah Mansyur. Kurang lebih satu tahun setelah berdirinya IPNU, didirikan pula organisasi IPPNU. Organisasi tersebut lahir pada 2 Maret 1955 di Solo, Jawa Tengah. Nyai Umroh Mahfudzah menjadi tokoh yang turut mendirikan. Sejak awal didirikannya, IPNU dan IPPNU adalah bagian dari LP. Ma'arif. Namun, pada tahun 1966 ketika

diselenggarakan kongres IPNU dan IPPNU di Surabaya, dua organisasi ini menjadi badan otonom (banom) NU dan tidak lagi terkait dengan LP. Ma'arif sebagai induk organisasi.

Sejak awal didirikan, IPNU telah melalui berbagai dinamika, salah satunya adalah perubahan nama. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1988, saat kongres IPNU ke-10 di Jombang. Kongres ini yang kemudian dikenal dengan istilah Deklarasi Jombang. Pada deklarasi tersebut, nama organisasi yang semula IPNU diubah ke Ikatan Putera Nahdhatul Ulama. Perubahan kepanjangan tersebut juga lebih dulu dilakukan oleh IPPNU melalui kongresnya yang ke-9 di Jombang pada tanggal 29-31 Januari 1988. Kepanjangan IPPNU yang sebelumnya adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama, berubah menjadi Ikatan Putri-putri Nahdhatul Ulama. Perubahan nama tersebut bukan tanpa sebab, karena mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang keormasan yang dibuat oleh rezim Orde Baru. Isi undang-undang tersebut diantaranya mewajibkan sekolah hanya memiliki organisasi tunggal, yakni OSIS. Tetapi saat rezim tangan besi Orde Baru tumbang, kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengembalikan kepanjangan IPNU dan IPPNU seperti pada awal kelahirannya melalui kongres IPNU ke-14 dan kongres IPPNU ke-13 pada tanggal 18-22 Juni 2003 di Surabaya. Dengan diselenggarakannya dua kongres tersebut hingga saat ini, kepanjangan IPNU dan IPPNU resmi dikembalikan seperti nama semula.

IPNU-IPPNU adalah wadah perjuangan bagi pelajar NU untuk memberikan edukasi dan mensosialisasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan dan pengkaderan sebagai usaha menegakkan ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) dalam kehidupan masyarakat. Sasaran yang menjadi target pembinaan IPNU-IPPNU adalah kelompok pelajar, siswa, santri dan mahasiswa dengan syarat keanggotaanya yang terdapat dalam PD/PRT. Dalam praktiknya, IPNU-IPPNU memiliki fungsi penting dalam dunia keterpelajaran di antaranya menjadi wadah berhimpun untuk mencetak kader aqidah, kader ilmu dan mencetak kader yang organisatoris.

IPNU-IPPNU memiliki fungsi yang setara dengan badan otonom lainnya yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan NU pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu pelajar. Selain itu, secara internal juga merupakan bagian dari generasi muda NU untuk mewujudkan cita-cita perjuangan NU dan bangsa Indonesia. Sebagai langkah mengejawantahkan aqidah dan asas, IPNU-IPPNU

memiliki empat sifat organisasi, yakni keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Empat sifat tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan “Terbentuknya putra-putri bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegaknya syariat Islam menurut paham Aswaja yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen” (Wahyudi & Hazin, 2018: 54-59). Sebagaimana berdasarkan khittahnya, menurut kongres XVI IPNU Jawa Timur, Aswaja merupakan tata cara untuk berfikir, bersikap, dan bertindak yang menjadi pedoman warga Nahdliyin. Sikap dasar ini pulalah yang menjadi watak IPNU-IPPNU dengan watak keislamannya yang mendalam dan menjunjung citra keindonesiaan.

2.2. Sepintas Ihwal IPNU-IPPNU Ranting Capgawen Selatan

Capgawen Selatan adalah sebuah wilayah, tepatnya suatu kampung yang secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Capgawen Selatan mayoritas adalah warga penganut ajaran Nahdlatul Ulama (NU), sehingga tak mustahil jika banyak menemui kegiatan keagamaan yang menjadi ciri khas NU dan organisasi-organisasi yang juga merupakan organisasi turunannya; seperti IPNU dan IPPNU.

IPNU-IPPNU yang akan dibahas dalam subbab ini adalah IPNU-IPPNU yang baru didirikan sekitar kurang lebih dua tahun lalu. Karena perlu diketahui, di Capgawen Selatan sebelumnya sempat ada organisasi IPNU-IPPNU. Namun, keberadaannya tak bisa bertahan lama dan sempat vakum dalam waktu yang lama. Setelah vakum, barulah IPNU-IPPNU yang akan menjadi pembahasan dalam riset ini berdiri kembali.

IPNU-IPPNU ranting Capgawen Selatan selanjutnya akan disingkat Capsel, berdiri tepatnya pada tanggal 19 Juni 2019. Terakhir, tercatat organisasi ini memiliki jumlah anggota keseluruhan 55 orang, yaitu 30 orang pada IPPNU dan 25 orang pada IPNU. Saat didirikan, IPNU Capsel melantik seorang ketua yang bernama rekan Khusnul Marom, sedangkan pada IPPNU diketuai oleh rekanita Lilis.

2.3. Karakter Religius

Karakter yang berasal dari bahasa Latin, secara etimologi berarti watak, tabiat, sifat-sifat kewajiban, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Kemudian, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *character*. Menurut Fitri (2012) dalam kamus Psikologi, karakter memiliki arti kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau kejujuran. Sedangkan secara terminologi, karakter merupakan sifat manusia pada umumnya tergantung pada faktor kehidupannya sendiri, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang menjadi khas suatu kelompok/ seseorang (Fitri, 2012:20). Karakter juga dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Mukhlis, 2020: 1). Individu yang berkarakter baik adalah yang mampu membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan akibat dari keputusannya.

Religius dalam KBBI bermakna *Religios/re-li-gious/religius* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan paut dengan agama. Komposisi kata dasar religius yakni religi. Kata tersebut dari bahasa asing *religion* yang termasuk dalam kata benda dan memiliki arti agama atau kepercayaan akan adanya suatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius merupakan kata sifat yang berasal dari kata *religious* yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, religius merupakan cara pandang seseorang mengenai agamanya dan bagaimana seseorang menimplementasikan keyakinannya itu dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai salah satu nilai karakter, religius dibatasi sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Berkait dengan hal itu, karakter religius dapat dimaknai perwujudan sikap dan perilaku yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang merupakan pokok pangkal terwujudnya kehidupan yang damai. Dapat pula didefinisikan sebagai perilaku mendalami nilai-nilai agama agar tertanam dalam diri setiap insan sehingga lahir manusia yang berwatak dan berbudi pekerti sesuai ajaran agama (Hambali & Yulianti, 2018).

2.4. Masa Remaja

Dalam perkembangan hidupnya, manusia akan mengalami masa yang dinamakan remaja. Masa ini berada pada masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Oleh sebab itu, fase ini kerap disebut masa transisi. Pada fase transisi

ini, manusia akan mengalami banyak perubahan, baik secara biologis, psikologis dan sosial. Pendapat demikian sejalan dengan yang dikemukakan Maslihah (2011) bahwa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa.

Remaja menurut Wahidin (2013) yaitu tahapan pertumbuhan pada diri manusia, baik dari aspek fisik maupun psikologis, yang terjadi pada rentang usia antara 12 sampai 22 tahun. Perubahan yang paling tampak pada diri remaja salah satunya adalah hubungan sosial. Artinya, remaja memiliki keinginan kodrati untuk bergaul dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Sementara menurut Amanda, dkk., (2017) pembabagan fase remaja terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Remaja awal (10-13 tahun)

Pada masa ini perubahan jasmani terlihat sangat mencolok. Selain itu, perkembangan nalar intelektualnya juga mengarah menjadi lebih intensif. Hal ini mendorong minat individu atau remaja terhadap kehidupan social berubah sangat tinggi. Di tahap ini, remaja menanggalkan segala hal yang berbau anak-anak termasuk sifat kekanak-kanakan, namun belum secara komprehensif.

b. Remaja pertengahan (14-16 tahun)

Tahap remaja pertengahan, timbul keinginan aktual yaitu kesadaran batiniah dan badaniah. Namun pada masa ini, kepribadian remaja masih cenderung individualis. Remaja juga mulai merenungkan penalaran tingkat tinggi yakni filosofis dan memerhatikan etika. Oleh karena itu, kepercayaan diri pada remaja akan timbul dan mereka akan menemukan jati dirinya.

c. Remaja akhir (17-19 tahun)

Tahap remaja akhir, individu akan cenderung stabil dan mantap. Remaja mulai mengenali diri sendiri dan memiliki keinginan hidup sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan. Remaja mulai paham akan apa yang menjadi pedoman dan akan menyadari tujuan hidupnya. Oleh sebab itulah, pada masa ini remaja akan menemukan pendiriannya berdasarkan pola yang telah ditemukannya.

2.5. Peran IPNU-IPPNU Capgawen Selatan dalam Meningkatkan Karakter Religius Remaja

Remaja adalah aset berharga bagi masa depan suatu daerah. Perannya akan diharapkan sebagai generasi penerus dalam mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Namun, pada era seperti saat ini, media digital, terutama dalam bentuk *game online* menjadi santapan sehari-hari remaja. Masalah seperti ini juga bersinggungan dengan remaja Capsel. Terlebih pada situasi pandemi seperti saat ini, yang mewajibkan pembelajaran harus dilakukan jarak jauh dari rumah, remaja justru lebih sering berinteraksi dengan gawainya. Kontrol dari orang tua terhadap perilaku remaja tersebut juga dirasa kurang akibat kesibukannya masing-masing.

Keberadaan organisasi IPNU-IPPNU di Capsel memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan karakter religius remaja karena notabene organisasi ini beranggotakan remaja atau pelajar. *Background* kampung Capsel yang sudah cukup religius, memudahkan organisasi ini untuk terus hidup dan mendapat respon serta dukungan baik dari warganya. Hal ini terbukti melalui kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya keagamaan maupun sosial yang mendapat respon baik melalui peran serta seluruh masyarakat Capsel. Setidaknya, keberadaan organisasi di kampung ini menjadi ruang bagi remaja untuk mengisi kesibukan, berproses dan belajar. Beberapa langkah yang bisa digunakan IPNU-IPPNU Capsel untuk meningkatkan karakter religius remaja adalah sebagai berikut:

a. Mengadakan Kegiatan Rutinan Yasintana

Yasintana adalah akronim dari Yasin Tahlil dan Nariyah. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap malam Ahad dengan jadwal dua minggu sekali. Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara *rolling* atau secara bergantian di rumah anggota atau dalam istilah disebut *ngedhongi*. Dalam kegiatan ini akan dilakukan pembacaan Surat Yasin, Tahlil dan dilanjutkan dengan pembacaan Shalawat Nariyah.

Melalui kegiatan Yasintana, IPNU-IPPNU Capsel memiliki tujuan untuk mengamalkan ajaran NU dan menjadi sebarang pelestarian ritus amalan dalam ajaran NU. Kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Selain membaca Yasin, Nariyah dan Tahlil, setelah acara selesai para anggota yang hadir juga melakukan *sharing-sharing* ringan terkait keorganisasian ataupun hal-hal lainnya.

b. Mengadakan Latihan Simtud Duror

Simtud Duror adalah sebuah kesenian Islam dengan menggunakan alat musik rebana. Lagu-lagu yang dimainkan biasanya diambil dari teks-teks shalawat. IPNU-IPPNU Capsel memiliki grup simtud duror yang bernama Al-Azhar. Tujuan dibentuknya grup Simtud Duror ini adalah untuk melestarikan seni budaya Islami.

Selain untuk melestarikan seni-budaya, dibentuknya grup Simtud Duror ini juga dimanfaatkan untuk wadah latihan bagi rekan-rekan IPNU-IPPNU ataupun remaja lainnya. Al-Azhar juga sering tampil dalam acara-acara ritus hari besar Islam semacam Maulid Nabi, Isra Miraj, perayaan tahun baru Muharram, dan lainnya. Dengan adanya grup Simtud Duror milik IPNU-IPPNU ini, memberi kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan karakter religius dan potensi yang dimilikinya melalui musik.

c. Kegiatan Sosial Penggalangan Dana Korban Bencana

Di samping mengadakan kegiatan dengan tema keagamaan, IPNU-IPPNU juga mempunyai kegiatan dengan tema sosial, salah satunya yaitu penggalangan dana untuk korban bencana. Saat Kota Pekalongan tertimpa musibah bencana banjir rob, IPNU-IPPNU Capsel mengajak remaja untuk terlibat menggalang dana bantuan untuk korban banjir. Kegiatan galang dana tersebut dilakukan dengan meminta sumbangan kepada seluruh masyarakat Capsel. Dengan demikian, melalui kegiatan ini IPNU-IPPNU berhasil membangun solidaritas ukhuwah Islamiyah melalui bantuan terhadap korban banjir.

d. Mengadakan “Gowes Religi”

Saat moment bersepeda sedang viral, kesempatan ini tak dilewatkan begitu saja oleh IPNU-IPPNU Capsel. Organisasi ini mengadakan kegiatan Gowes Religi yang dapat diikuti seluruh masyarakat Capgawen selatan. Gowes Religi adalah kegiatan sepeda santai dengan dikolaborasikan Ziarah ke makam wali di Pekalongan. Dengan demikian IPNU-IPPNU berhasil mengintegrasikan olahraga dengan kegiatan religi. Selain sebagai sarana refreshing, kegiatan ini melatih pembiasaan bagi anggota dan remaja Capsel untuk menjaga tradisi Aswaja, yaitu Ziarah.

e. Mengadakan Ngaji Pasaran, Rutinan Tadarus, dan Bagi Takjil setiap bulan Ramadan

IPNU-IPPNU Capsel juga mengadakan kegiatan momentual setiap tahun yaitu di bulan Ramadan. Untuk mengisi kegiatan di Bulan Ramadan, IPNU-

IPPNU mengadakan tiga kegiatan; ngaji pasaran, rutinan tadarus dan bagi takjil. Ngaji pasaran adalah sebuah kegiatan dengan konsep yang diambil dari pesantren, yaitu ngaji kitab kuning. Dalam kegiatan ini, IPNU-IPPNU bekerja sama dengan kiai kampung untuk mengampu kitab kuning. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali setiap minggu selama bulan Ramadan.

Tak hanya ngaji pasaran, IPNU-IPPNU juga mengadakan rutinan tadarus al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Sistem tadarus yang dipakai adalah dengan membaca al-Qur'an secara bergiliran; satu membaca, yang lain mendengarkan (*nyemak*). Ngaji pasaran dan tadarus ini memanfaatkan aula Mushola At-Thohir sebagai tempatnya. Rutinitas kegiatan setiap Ramadan yang terakhir adalah buka bersama dan bagi takjil. Untuk menyelenggarakan dua kegiatan tersebut IPNU-IPPNU menggunakan dana secara kolektif dari iuran anggotanya. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan dibelikan takjil untuk dibagi-bagikan di jalan kepada pengguna jalan yang lewat.

f. Wadah Bagi Remaja Untuk Belajar Berorganisasi

Peran IPNU-IPPNU Capsel yang terakhir adalah menjadi wadah bagi remaja Capsel untuk belajar berorganisasi. Anggota IPNU-IPPNU memiliki latar belakang yang bervariasi, ada anggota yang sudah memiliki pengalaman dalam berorganisasi, ada juga mereka yang belum pernah sama sekali menginjak dunia organisasi. Melalui IPNU-IPPNU ini memberi kesempatan secara luas bagi anggotanya yang belum mengenal organisasi untuk bisa belajar lebih mendalam. Bagi yang sudah memiliki pengalaman berorganisasi, dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan pengalamannya.

3. Kesimpulan

Remaja adalah generasi yang menjadi harapan bagi orang tua maupun daerahnya. Perannya akan dinantikan untuk menggantikan generasi sebelumnya. Dengan demikian, di era informatika dan globalisasi seperti saat ini, tantangan untuk mengembangkan karakter religius remaja semakin terbuka lebar. Peran segenap elemen sangat diharapkan bagi berkembangnya karakter religius remaja di suatu daerah, salah satunya adalah peran organisasi semacam IPNU-IPPNU.

IPNU-IPPNU Capgawen Selatan hadir sebagai pembentuk dan penyeimbang karakter religius remaja. Melalui kiprahnya dalam berbagai kegiatan yang diseleenggarakan, IPNU-IPPNU memiliki misi yang mulia. Selain

untuk memperkuat basis Nahdhatul Ulama di struktur paling bawah, IPNU-IPPNU juga menjadi sangat potensial difungsikan sebagai sarana perubahan sosial bagi suatu daerah; khususnya untuk meningkatkan karakter religius remaja.

Referensi

- Affandy, S. (2019). PENANAMAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEBERAGAMAAN PESERTA DIDIK. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.15575/ath.v2i2.3391>
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Fitri, Agus Zainul. (2012). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*. Ar-Ruzz Media.
- Hambali, Muh., & Yulianti, E. (2018). Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Di Kota Majapahit. *Pedagogik*, 5(2).
- Kamilun. (2011). *Buku Saku IPNU-IPPNU Provinsi Jawa Tengah*. Adi Offset.
- Maslihah, S. (t.t.). *STUDI TENTANG HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL, PENYESUAIAN SOSIAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PRESTASI AKADEMIK SISWA SMPIT ASSYFA BOARDING SCHOOL SUBANG JAWA BARAT*. 12.
- Mukhlis, Abdul. (2020). RELASI AKHLAK DAN BAHASA: SUMBANGSIH SOSIOLINGUISTIK TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PROFETIK SISWA. *Cakrawala Linguista*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.26737/cling.v3i1.1904>
- Singgih D. Gunarsa. (2011). *Konseling dan Psikoterapi*. Libri.
- Suradi, A. (2018). Penanaman Religiusitas Keislaman Berorientasi pada Pendidikan Multikultural di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 6(1), 25–43. <https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.1.25-43>
- Taopan, Y. F., Oedjoe, M. R., & Sogen, A. N. (2019). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perilaku Moral Remaja di SMA Negeri 3 Kota Kupang. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.33394/jk.v5i1.1395>
- Wahidin, Unang. (2013). PENDIDIKAN KARAKTER BAGI REMAJA. *Edukasi Islami*, 2(3).
- Wahyudi & Hazin. (2018). *Pedoman Kaderisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama*. Pimpinan Pusat IPNU.

Wardati, Z. (2019). Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Sosial Anak pada Habib Alby Home Schooling. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 2(2), 261. <https://doi.org/10.22373/jie.v2i2.4185>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).